

**LAPORAN AKHIR**

**ROADMAP  
PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2015-2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Program pembangunan Perserikatan Bangsa – Bangsa atau UNDP (*United Nations Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kubutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Pembangunan manusia tidak hanya sebatas hal tersebut. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

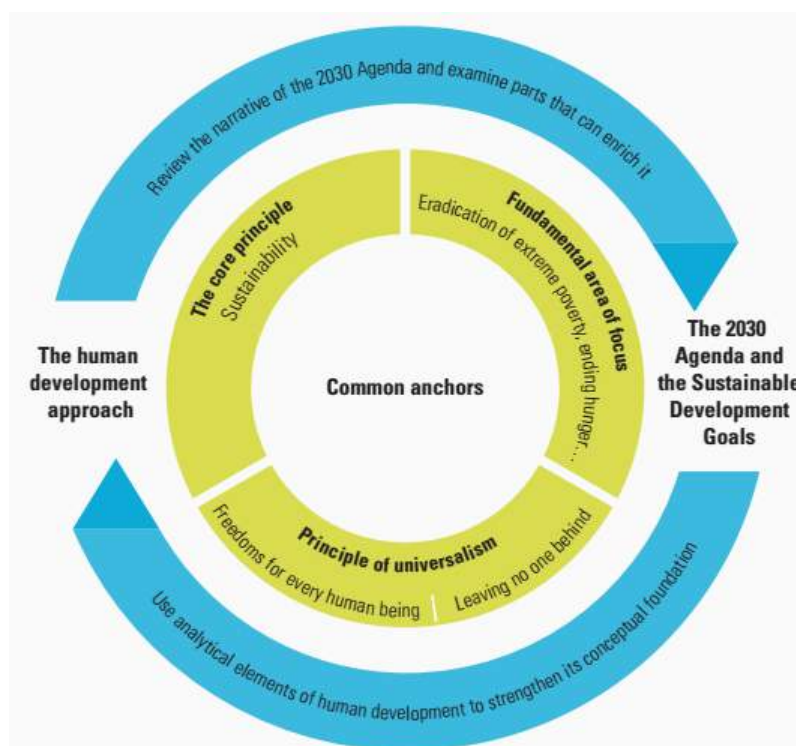
Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan. Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Pertama*, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat memperkuat landasan konseptual SDGs



## BAB I PENDAHULUAN

dengan melihat beberapa pendekatan analitis yang digunakan oleh IPM. Demikian juga dengan beberapa pendekatan IPM yang dapat menjelaskan capaian SDGs. *Kedua*, indikator SDGs dapat menggunakan indikator IPM dalam upaya menilai kemajuan SDGs. Hal yang sama juga dengan pendekatan IPM yang dapat melengkapi indikator yang digunakan oleh SDGs. *Ketiga*, Laporan IPM dapat memperkuat indikator SDGs dan SDGs juga dapat dijadikan dasar untuk melihat pendekatan IPM dimasa mendatang.



Gambar 1.1. Hubungan antara IPM dengan SDGs  
Sumber : *Human Development Report 2016*

Sejak diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, IPM telah mengalami beberapa penyempurnaan metodologi sebanyak 5 kali. Pada tahun 2014, UNDP menyempurnakan metodologi penilaian IPM. Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM disebabkan beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Selain itu, PDB per kapita tidak

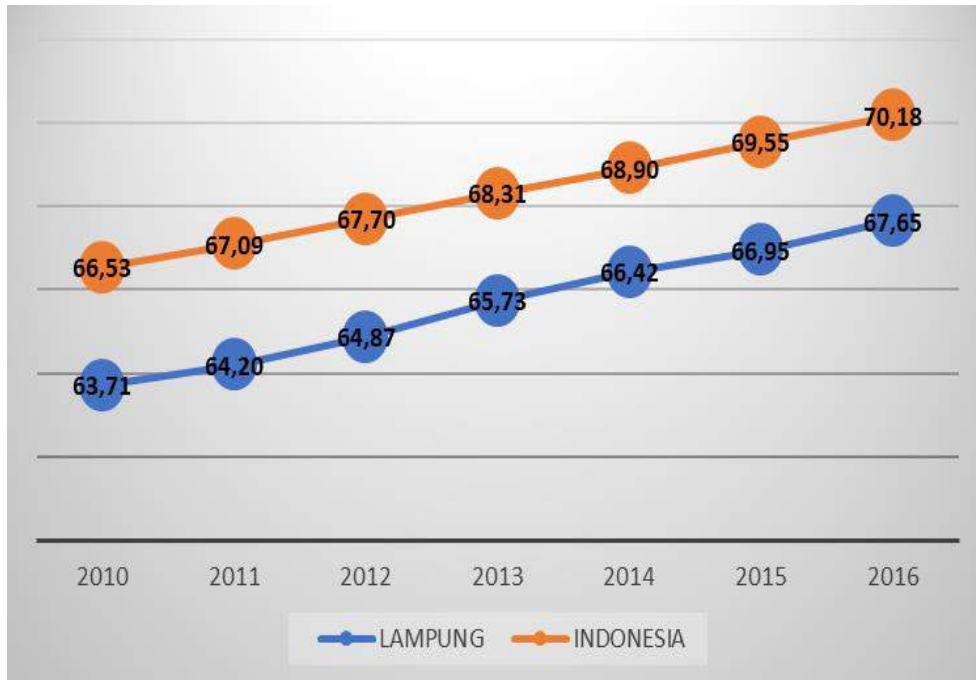


## BAB I PENDAHULUAN

dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dalam hal metode penghitungan, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Beberapa perubahan indikator IPM antara lain Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita serta metode perhitungan dengan agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

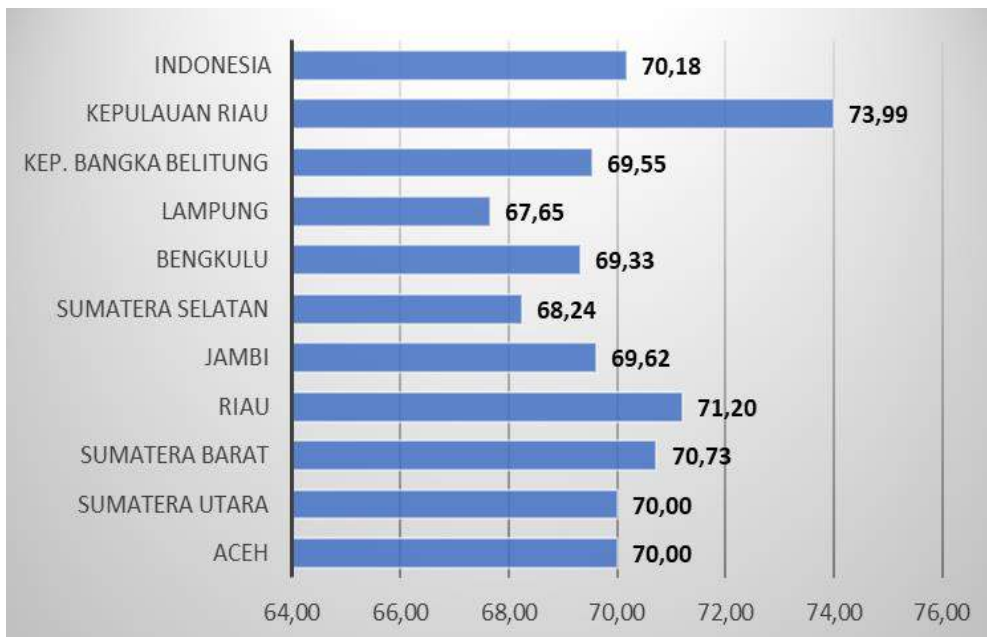
Laporan UNDP menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2015 sebesar 0,689 dan menempatkan Indonesia di peringkat 113 dari 118 negara, dengan kategori pembangunan manusia berada pada tingkat menengah atau sama dengan tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 25 tahun, IPM Indonesia telah mengalami peningkatan yang kurang baik dimana pada tahun 1990 nilai IPM Indonesia sebesar 0,528 atau meningkat 30,5 persen. Dalam kurun waktu tersebut Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia meningkat menjadi 5,8 tahun, rata-rata lama penduduk 25 tahun keatas yang bersekolah meningkat 4,8 tahun, dan harapan lama sekolah meningkat 2,8 tahun.

Pencapaian IPM Provinsi Lampung selama kurun waktu 2010 – 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, IPM Provinsi Lampung menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 63,71 menjadi 67,65 pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 6,18 persen. Namun demikian, peningkatan tersebut masih berada dibawah capaian IPM nasional dimana pada tahun 2016 nilai IPM Indonesia sebesar 70,18 atau terjadi kesenjangan sebesar 2,53. Memperhatikan pertumbuhan IPM Provinsi Lampung dengan besarnya kesenjangan, maka diperlukan upaya lebih dari pemerintah Provinsi Lampung untuk mempersempit kesenjangan tersebut.



Gambar 1.2. Perkembangan IPM Provinsi Lampung dan Indonesia  
 Sumber : Badan Pusat Statistik

Capaian IPM Provinsi Lampung pada tahun 2016 dapat dikatakan masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain di Sumatera. Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah dengan IPM tertinggi di Sumatera dengan capaian 73,99. Terdapat dua Provinsi dengan capaian IPM diatas capaian nasional antara lain Provinsi Riau (71,20) dan Provinsi Sumatera Barat (70,73).

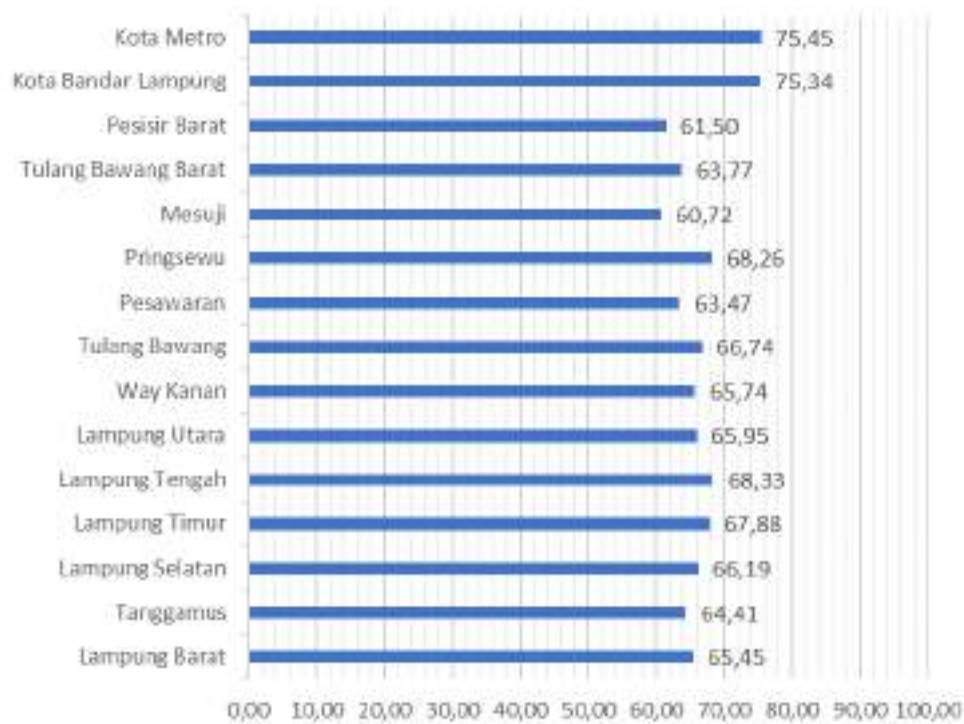


Gambar 1.3. Capaian IPM Provinsi Se-Sumatera Tahun 2016  
 Sumber : Badan Pusat Statistik



## BAB I PENDAHULUAN

Upaya peningkatan capaian IPM Provinsi Lampung dapat dilakukan dengan mempersempit kesenjangan capaian IPM antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian di wilayah Lampung masih belum merata. Pada tahun 2016, terdapat 2 Kota di Provinsi Lampung dengan capaian di atas capaian nasional yaitu Kota Metro (75,45) dan Kota Bandar Lampung (75,34). Adapun 13 Kabupaten lainnya masih dibawah capaian IPM nasional bahkan capaian beberapa Kabupaten seperti Mesuji (60,72) dan Pesisir Barat (61,50) masih tertinggal.



Gambar 1.4. Capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016  
Sumber : Badan Pusat Statistik

Grand design Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung merupakan salah satu upaya untuk merencanakan peningkatan IPM secara terintegrasi dan berkesinambungan agar terjadi akselerasi peningkatan capaian IPM Provinsi Lampung dimasa mendatang. Pemetaan permasalahan terkait daya ungkit capaian IPM serta penyusunan strategi yang *holistic* akan mampu mengurangi kesenjangan capaian IPM antar Kabupaten/kota di Provinsi Lampung.



### 1.2. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
- b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- d) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
- e) Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
- f) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- g) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015-2019;
- h) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017

### 1.3. Tujuan

Tujuan Grand Design Indeks Pembangunan Manusia adalah :

- a) Memberikan gambaran tentang capaian IPM Provinsi Lampung beserta faktor-faktor pendukung IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
- b) Identifikasi terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian IPM Provinsi Lampung yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.



## BAB I PENDAHULUAN

- c) Menyusun tahapan, target, serta strategi pencapaian indikator IPM Provinsi Lampung (*roadmap*) dimasa mendatang yang meliputi indikator kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
- d) Memberikan arah kebijakan dan pedoman bagi berbagai instansi di Provinsi Lampung dalam upaya merencanakan pembangunan manusia yang terstruktur dan terintegrasi.

### 1.4. Sasaran

Adapun sasaran Grand Design IPM tahun 2015-2025 Provinsi Lampung antara lain:

- a) Meningkatnya capaian faktor-faktor pendukung IPM Provinsi Lampung yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
- b) Tersusunnya peta berbagai masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian IPM Provinsi Lampung yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
- c) Tersusunnya tahapan, target, serta strategi pencapaian indikator IPM Provinsi Lampung (*roadmap*) dimasa mendatang yang meliputi indikator kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
- d) Implementasi arah kebijakan dan pedoman bagi berbagai instansi di Provinsi Lampung dalam upaya merencanakan pembangunan manusia yang terstruktur dan terintegrasi.



## 2

# KONDISI IPM PROVINSI LAMPUNG

## 2.1. Dimensi Pendidikan

### A. Rata - Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.



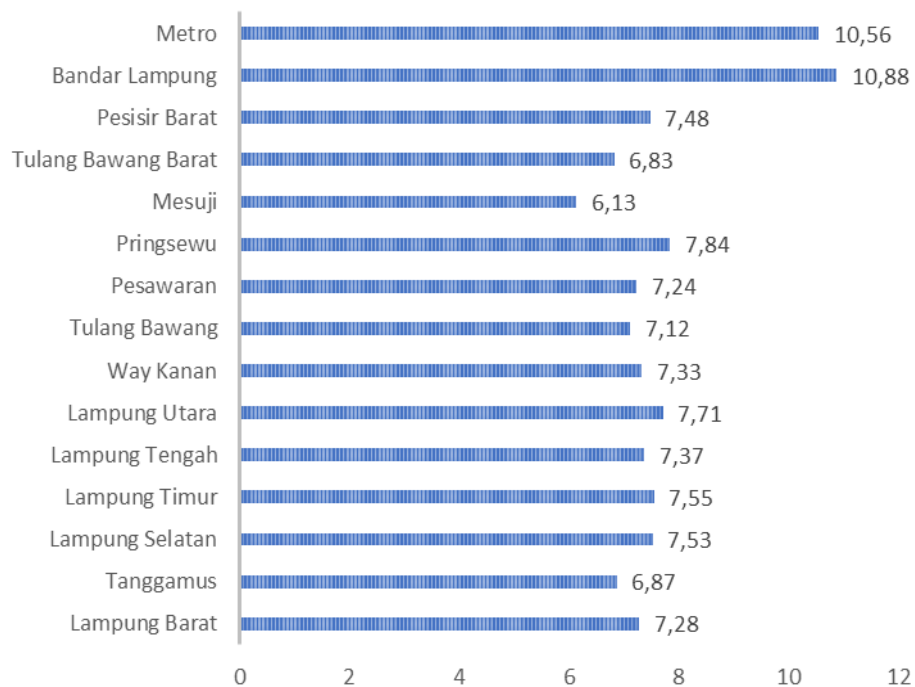
Gambar 2.1. Perbandingan Rata-rata lama sekolah se-Sumatera dan Indonesia 2016  
Sumber : BPS (data dinamis)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung mencapai 7,63 tahun pada tahun 2016. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penduduk diatas 25 tahun di Provinsi Lampung rata-rata menempuh pendidikan pada tingkatan menengah pertama. Walaupun demikian, capaian tersebut masih dibawah angka



Nasional dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 7,95 tahun. Bahkan pada wilayah Sumatera, Provinsi Lampung belum mampu bersaing dengan provinsi lain dengan angka tertinggi wilayah Sumatera pada tahun 2016 sebesar 9,67 yang dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau.

Perkembangan rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung hanya pada tingkat pendidikan lanjutan pertama. Beberapa Kabupaten memiliki rata-rata lama sekolah yang cukup rendah (<7 tahun) antara lain Kabupaten Mesuji (6,13), Kabupaten Tulang Bawang Barat (6,83), dan Kabupaten Tanggamus (6,87). Adapun rata-rata penduduk yang memiliki tingkat pendidikan menengah atas terjadi pada wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung (10,56) dan Kota Metro (10,88). Upaya peningkatan nilai rata-rata lama sekolah dan menghilangkan kesenjangan merupakan hal yang sulit dilakukan mengingat perbedaan orientasi penduduk berusia 25 tahun keatas. Namun demikian, sinergitas seluruh elemen dalam upaya peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan capaian yang lebih baik.



Gambar 2.2. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung  
 Sumber : BPS (data dinamis)



### B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Lampung pada tahun 2016 mencapai 12,35 tahun dengan wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung dan Metro memiliki angka tertinggi. Secara umum, angka harapan lama sekolah di Provinsi Lampung sebesar 12,35 tahun menjadikan setiap penduduk berusia 7 tahun keatas akan dapat mencapai pendidikan hingga tingkat menengah atas.



Gambar 2.3. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung  
 Sumber : BPS (data dinamis)



**C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Capaian APS Provinsi Lampung cukup tinggi pada tingkat usia 7-15 tahun dengan rerata mencapai lebih dari 90 persen. Adapun pada tingkat usia 18-24 tahun terdapat beberapa wilayah yang memiliki APS yang rendah sehingga mempengaruhi capaian APS Provinsi Lampung pada usia 16-24 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia 7-24 tahun menempuh pendidikan pada jenjang lanjutan/menengah pertama.

Tabel 2.1. APS Provinsi Lampung tahun 2016

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			
	7-12	13-15	16-18	19-24
Lampung Barat	100,00	93,05	76,80	13,51
Tanggamus	99,04	90,20	76,48	19,34
Lampung Selatan	99,51	92,36	58,74	16,34
Lampung Timur	98,49	93,73	65,18	13,56
Lampung Tengah	99,60	95,94	64,89	15,13
Lampung Utara	100,00	93,81	71,30	17,40
Way Kanan	100,00	95,29	69,29	22,26
Tulang Bawang	100,00	94,37	61,06	13,90
Pesawaran	100,00	98,07	73,74	20,57
Pringsewu	100,00	96,61	71,32	21,91
Mesuji	100,00	88,78	64,79	12,56
Tulang Bawang Barat	100,00	94,05	73,95	17,02
Pesisir Barat	100,00	87,81	71,87	16,30
Bandar Lampung	100,00	96,53	79,50	36,06
Metro	100,00	95,88	87,66	24,66
Lampung	99,63	94,32	69,31	19,72

Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

Jika diteliti lebih lanjut, rendahnya APS Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan menengah pertama maupun menengah atas lebih disebabkan pada faktor motivasi untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Jarak sekolah dan biaya pendukung pendidikan merupakan dua faktor utama yang diduga menjadi penyebab rendahnya minat penduduk



untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari rasio murid dengan guru yang menunjukkan angka yang sangat baik. Pada jenjang pendidikan tingkat menengah atas, rasio murid dengan guru menunjukkan hal yang kurang baik dimana rasionya mencapai 3-9 murid dengan 1 orang guru. Bahkan di Kabupaten Mesuji, perbandingan murid dan guru pada jenjang pendidikan Madrasah Aliyah menunjukkan angka yang sama antara jumlah murid dengan guru.

Tabel 2.2. Rasio murid dan guru di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Rasio Murid/Guru			
	SMP	MTs	SMA	MA
Lampung Barat	9,45	14,03	9,01	3,12
Tanggamus	11,81	22,55	8,59	3,15
Lampung Selatan	12,29	30,72	9,22	3,35
Lampung Timur	10,90	25,53	9,02	3,19
Lampung Tengah	10,69	15,73	8,01	4,15
Lampung Utara	9,97	13,37	9,15	3,37
Way Kanan	11,51	13,18	9,25	2,92
Tulang Bawang	10,65	16,21	8,09	2,09
Pesawaran	10,55	22,33	8,98	2,71
Pringsewu	12,22	20,91	9,31	3,43
Mesuji	10,87	20,63	11,25	1,09
Tulang Bawang Barat	11,05	9,85	7,75	3,07
Pesisir Barat	10,15	17,04	10,17	3,20
Bandar Lampung	13,08	18,17	10,24	6,23
Metro	12,30	7,94	8,98	12,79
Lampung	11,28	18,72	9,10	3,53

Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

#### **D. Angka Partisipasi Murni**

APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM digunakan untuk Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.



Capaian APM Provinsi Lampung pada tahun 2016 tidak beriringan dengan capaian APS Provinsi Lampung. Perbedaan signifikan dimulai pada jenjang pendidikan menengah pertama hingga perguruan tinggi. Kota Metro dan Kota Bandar Lampung merupakan wilayah yang memiliki nilai APM yang tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Lampung. Disisi lain, capaian APM tersebut menunjukkan bahwa beberapa penduduk usia sekolah di Provinsi Lampung mengalami kondisi putus sekolah.

Tabel 2.3 Angka Partisipasi Murni di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	PT
Lampung Barat	100,00	74,19	64,86	0,94
Tanggamus	99,04	80,40	55,57	5,61
Lampung Selatan	98,13	76,42	48,44	6,83
Lampung Timur	95,35	84,23	61,96	4,21
Lampung Tengah	99,24	74,06	54,87	7,47
Lampung Utara	100,00	77,88	61,04	3,03
Way Kanan	99,31	78,78	62,68	3,96
Tulang Bawang	99,76	79,11	48,40	4,91
Pesawaran	99,32	77,88	66,26	6,53
Pringsewu	99,20	81,51	62,92	8,76
Mesuji	99,69	80,74	50,84	1,46
Tulang Bawang Barat	99,12	87,16	57,44	2,15
Pesisir Barat	97,66	84,44	69,12	7,49
Bandar Lampung	96,76	73,08	64,66	29,71
Metro	100,00	94,29	82,65	9,52
Lampung	98,46	78,34	58,85	9,22

Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

### E. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100



persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Capaian APK Provinsi Lampung pada tahun 2016 menunjukkan hasil yang cukup baik hingga jenjang pendidikan menengah atas. Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk menempuh pendidikan masih tinggi walaupun pada usia yang tidak tepat waktu. Namun demikian kondisi tersebut tidak terjadi pada jenjang pendidikan tinggi dimana capaian APK Provinsi Lampung pada jenjang pendidikan tinggi hanya 13,52 persen.

Tabel 2.4. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2016

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	PT
Lampung Barat	114,42	94,40	84,63	1,60
Tanggamus	111,87	105,40	75,80	6,43
Lampung Selatan	109,60	89,13	80,60	10,29
Lampung Timur	104,32	101,36	78,43	6,07
Lampung Tengah	114,57	91,36	69,81	13,38
Lampung Utara	114,87	89,97	90,44	7,41
Way Kanan	110,71	92,66	93,99	6,22
Tulang Bawang	115,87	93,58	70,14	5,10
Pesawaran	111,74	87,42	112,41	6,53
Pringsewu	112,22	95,24	83,48	11,78
Mesuji	106,94	101,35	61,52	2,12
Tulang Bawang Barat	111,69	109,42	84,17	3,59
Pesisir Barat	109,38	94,01	85,35	7,49
Bandar Lampung	113,85	85,41	97,38	42,59
Metro	106,58	101,78	103,83	14,20
Lampung	111,44	93,58	82,98	13,52

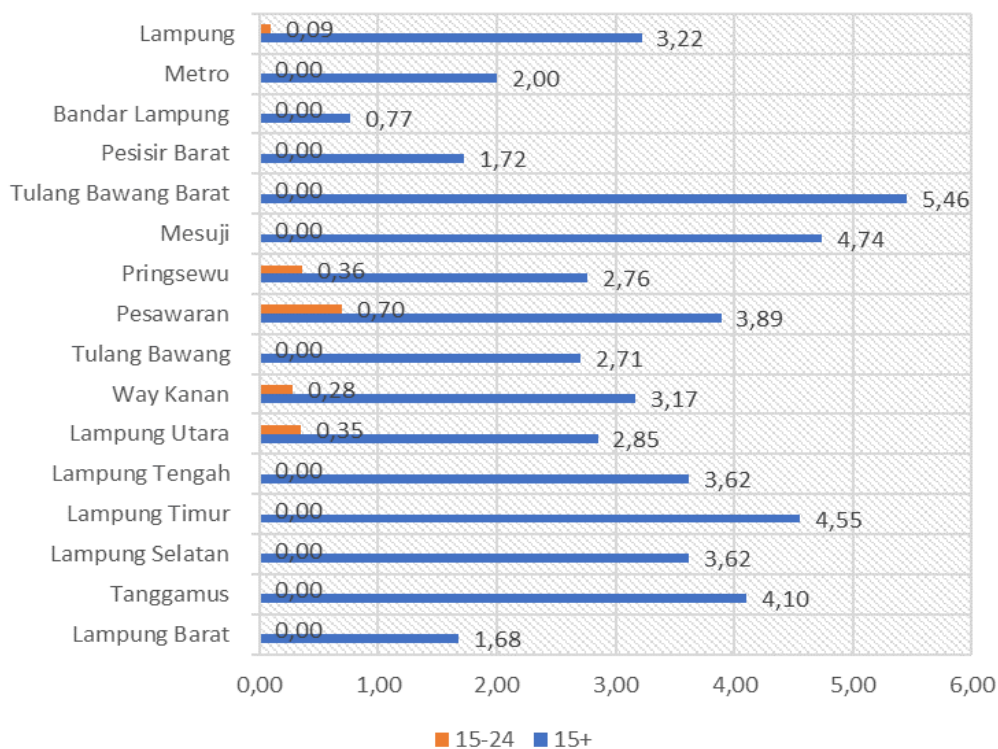
Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

## F. Penduduk Buta Huruf

Provinsi Lampung memiliki permasalahan pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian serius terkait persentase penduduk yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis (buta huruf). Pada tahun



2016, persentase penduduk buta huruf berusia 15 tahun keatas di Provinsi Lampung mencapai 3,22%. Pada usia sekolah (15-24 tahun) jumlah penduduk buta huruf mencapai 0,09%. Hanya beberapa wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki penduduk buta huruf rendah (<2%) berusia 15 tahun keatas yaitu Kota Bandar Lampung, kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat. Wilayah lainnya memiliki jumlah penduduk buta huruf berusia 15 tahun keatas pada kisaran 2-5,46 persen. Disisi lain, penduduk usia sekolah (15-24 tahun) yang masih mengalami buta huruf terjadi di 4 wilayah Provinsi Lampung yaitu Pringsewu, Pesawaran, Way Kanan, dan Lampung Utara. Upaya pengentasan buta huruf melalui gerakan pemberantasan buta huruf perlu dilakukan seiring dengan pengaruhnya yang besar terhadap capaian indeks pendidikan pada IPM.



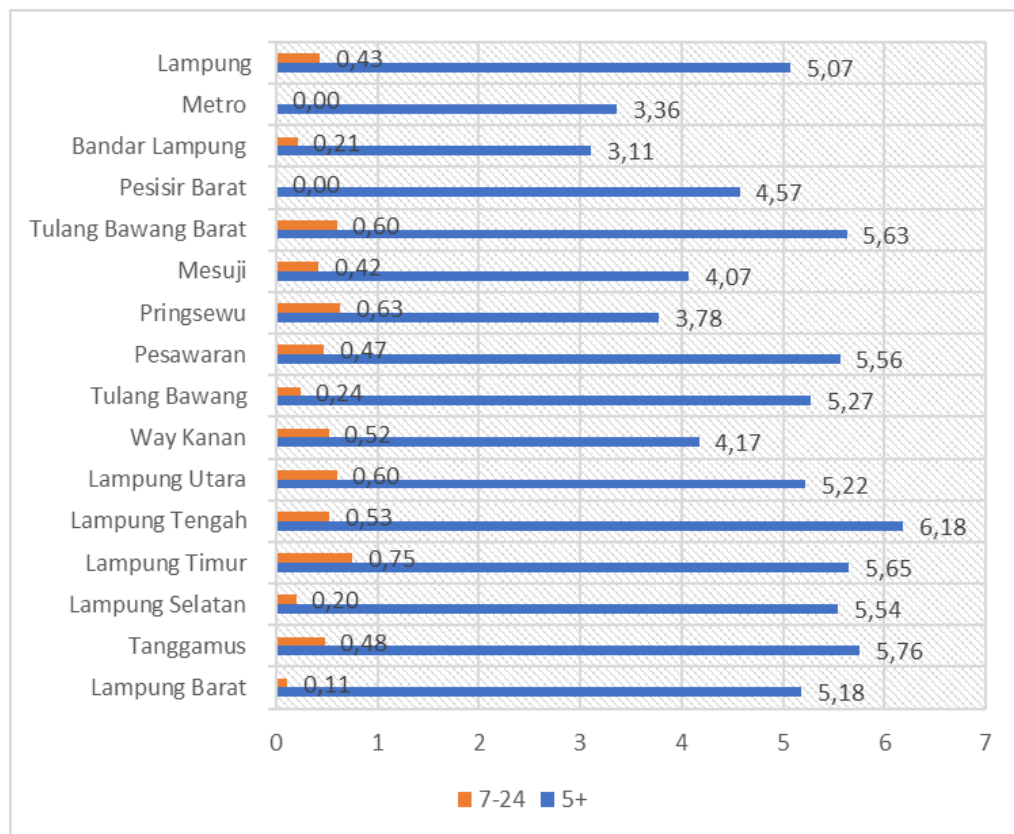
Gambar 2.5. Penduduk Buta Huruf di Provinsi Lampung  
 Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

Tingginya angka buta huruf di Provinsi Lampung tidak lepas dari masih tingginya penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum bersekolah.





Pada tahun 2016 jumlah penduduk 5 tahun keatas di Provinsi Lampung yang tidak/belum bersekolah mencapai 5,07 persen. Sebaran penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum bersekolah diberbagai wilayah Lampung cukup merata dengan capaian terendah terjadi pada Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Adapun wilayah tertinggi penduduk usia 5 tahun keatas yang tidak/belum bersekolah terjadi pada Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 2.6. Penduduk tidak/belum sekolah di Provinsi Lampung  
 Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

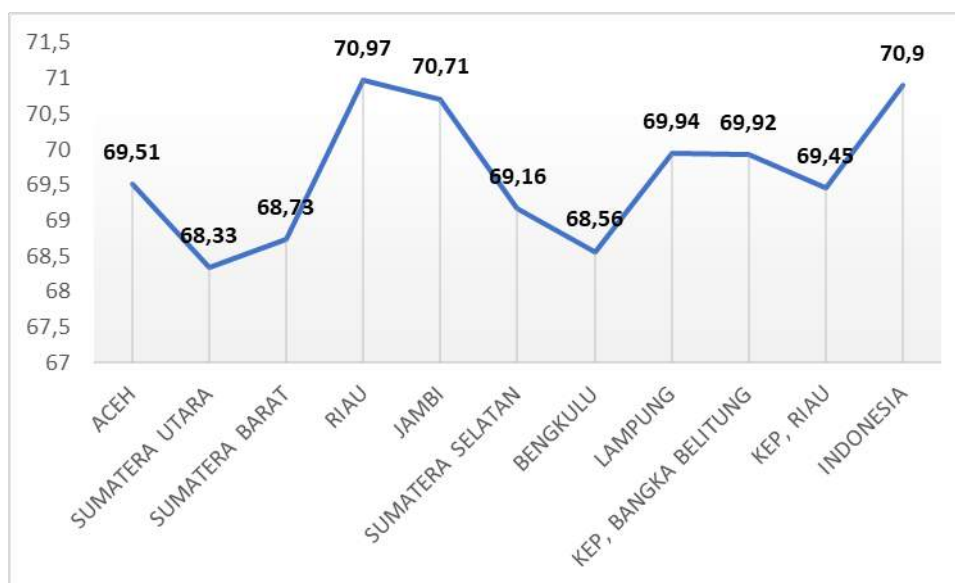
Pada usia sekolah (7-24 tahun) jumlah penduduk Provinsi Lampung yang tidak/belum sekolah mencapai 0,43 persen. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Lampung memiliki penduduk yang tidak/belum bersekolah pada usia 7-24 tahun dengan rata-rata capaian masih dibawah 1 persen. Kota Metro dan Kabupaten Pesisir Barat menjadi dua wilayah dimana penduduk berusia 7-24 tahun sudah pernah bersekolah.



## 2.2. Dimensi Kesehatan

### A. Angka Harapan Hidup

Indikator bidang kesehatan dapat ditunjukkan melalui Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir. Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.



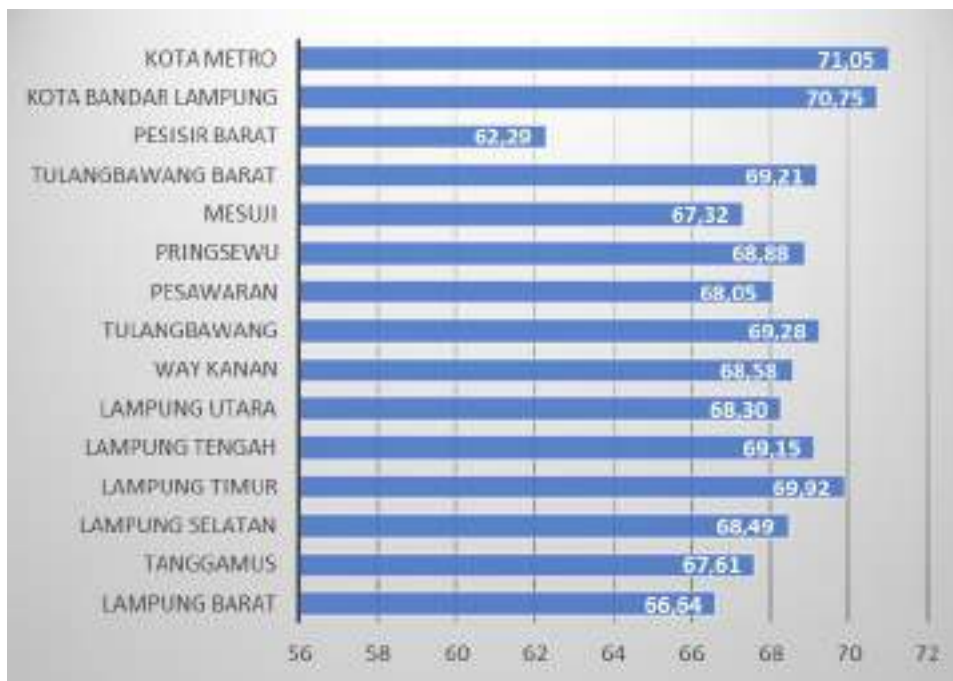
Gambar 2.7. Perbandingan AHH Saat Lahir se-Sumatera dan Indonesia 2016  
Sumber : data sekunder (bps)

Capaian AHH saat lahir Provinsi Lampung pada tahun 2016 sebesar 69,94. Capaian tersebut menempatkan Provinsi Lampung berada pada urutan ketiga capaian AHH tertinggi provinsi se-sumatera dibawah Riau (70,97) dan Jambi (70,71). Walaupun demikian, capaian tersebut masih dibawah angka nasional yang berada pada 70,90. Kesadaran penduduk akan persoalan kesehatan dan ketersediaan akses kesehatan menjadi faktor dominan meningkatnya angka harapan hidup disuatu daerah.

Distribusi Angka Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Lampung per Kabupaten Kota Tahun 2016 didominasi oleh daerah perkotaan dengan Kota Metro mencapai 71,05 tahun. Adapun wilayah di Provinsi Lampung dengan nilai AHH terendah terdapat pada Kabupaten Pesisir Barat yang mencapai 62,29 tahun. Disparitas nilai AHH ini menunjukkan bahwa



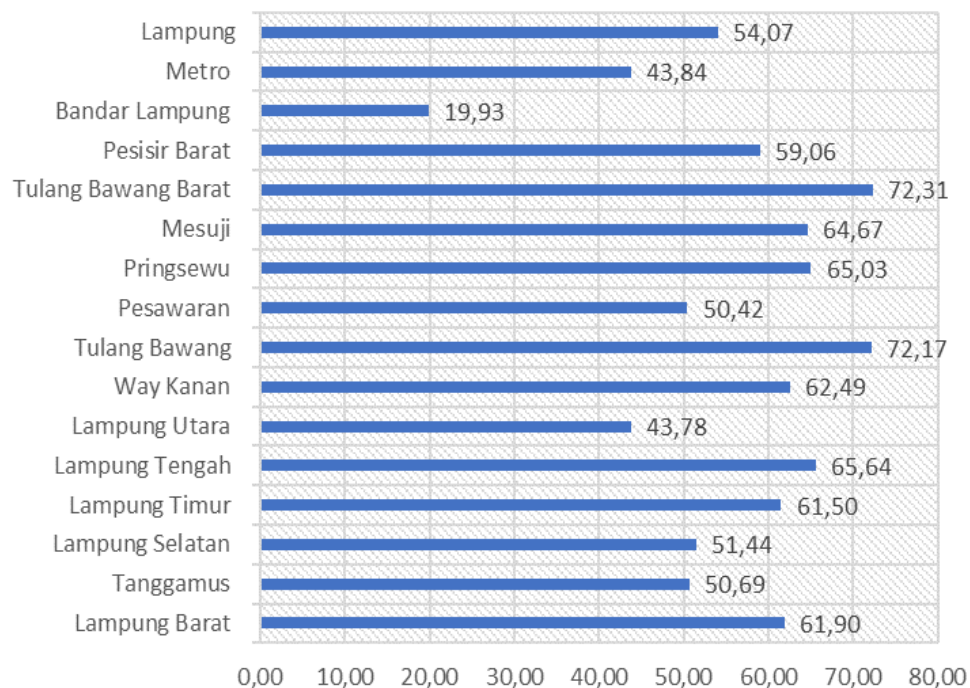
akses kesehatan serta tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk di Provinsi Lampung cukup baik, namun demikian pada daerah otonom baru tingkat kesadaran akan kesehatan penduduk masih belum memadai.



Gambar 2.8. Sebaran Angka Harapan Hidup Saat Lahir di Provinsi Lampung  
Sumber : data sekunder (bps)

## B. Aksesibilitas Kesehatan

Angka Harapan Hidup sangat erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Akses tersebut dapat difasilitasi dengan ketersediaan asuransi kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 2016, jumlah masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan masih tinggi yang mencapai 54,07 persen. Bahkan beberapa wilayah seperti Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat memiliki capaian yang sangat tinggi. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat jaminan kesehatan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat terutama masyarakat golongan bawah hingga menengah. Kota Bandar Lampung merupakan wilayah dengan kepemilikan jaminan kesehatan masyarakat yang sangat tinggi dimana hanya 19,93 persen masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan.



Gambar 2.9. Penduduk belum memiliki jaminan kesehatan di Provinsi Lampung 2016  
 Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

Aksesibilitas kesehatan juga erat kaitannya dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Fasilitas kesehatan di Provinsi Lampung dari polindes dan klinik hingga rumah sakit cukup memadai. Namun demikian, terdapat wilayah yang belum memiliki rumah sakit seperti Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat. Keberadaan rumah sakit pada setiap kabupaten/kota menjadi sangat penting mengingat rumah sakit memiliki fasilitas kesehatan yang lebih memadai jika dibandingkan dengan fasilitas kesehatan lainnya.



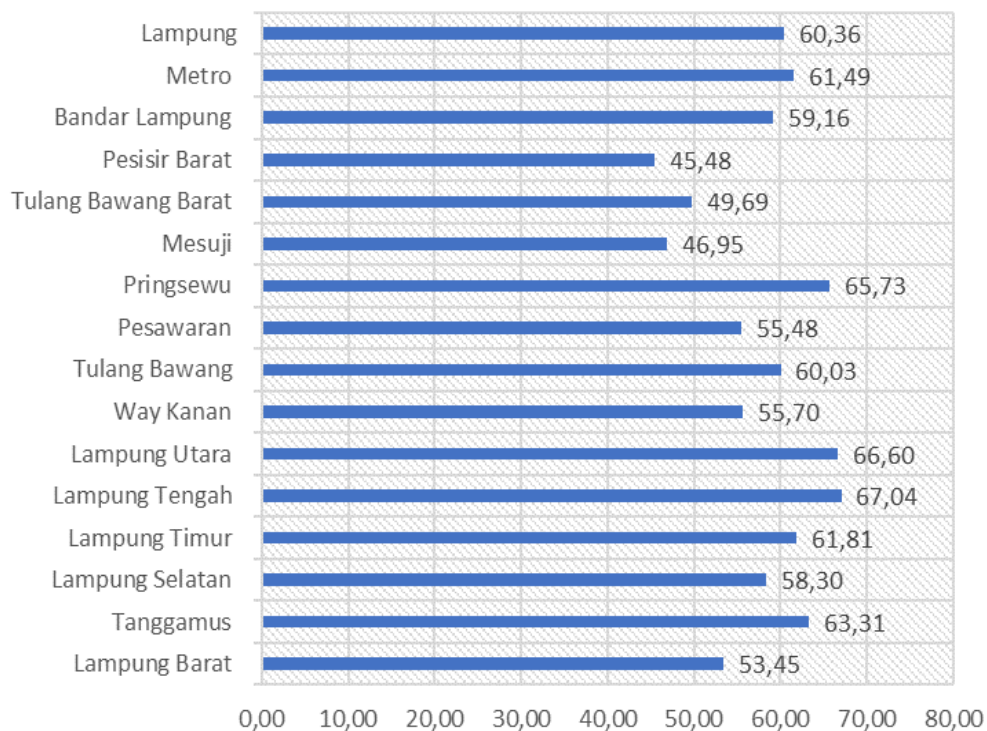
Tabel 2.5. Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rumah Sakit Hospital	Rumah Bersalin Maternity Hospital	Puskesmas Public Health Center	Posyandu Maternal & Child Health Center	Klinik/Balai Kesehatan Clinic/Health Center	Polindes Village Maternity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Kabupaten/Regency</b>						
1. Lampung Barat	2	1	12	255	5	3
2. Tanggamus	2	2	23	672	16	-
3. Lampung Selatan	2	-	26	1 004	1	-
4. Lampung Timur	1	-	34	1 262	21	-
5. Lampung Tengah	9	1	38	1 408	36	-
6. Lampung Utara	3	8	27	610	48	23
7. Way Kanan	4	-	19	420	19	-
8. Tulang Bawang	3	6	18	284	5	-
9. Pesawaran	2	-	12	444	18	-
10. Pringsewu	6	-	11	391	11	-
11. Mesuji	-	-	12	173	8	-
12. Tulang Bawang Barat	2	1	10	196	16	-
13. Pesisir Barat	-	-	9	169	2	27
<b>Kota/Municipality</b>						
1. Bandar Lampung	21	6	30	694	50	-
2. Metro	7	-	11	156	12	-
<b>Lampung</b>	<b>64</b>	<b>25</b>	<b>292</b>	<b>8138</b>	<b>268</b>	<b>53</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

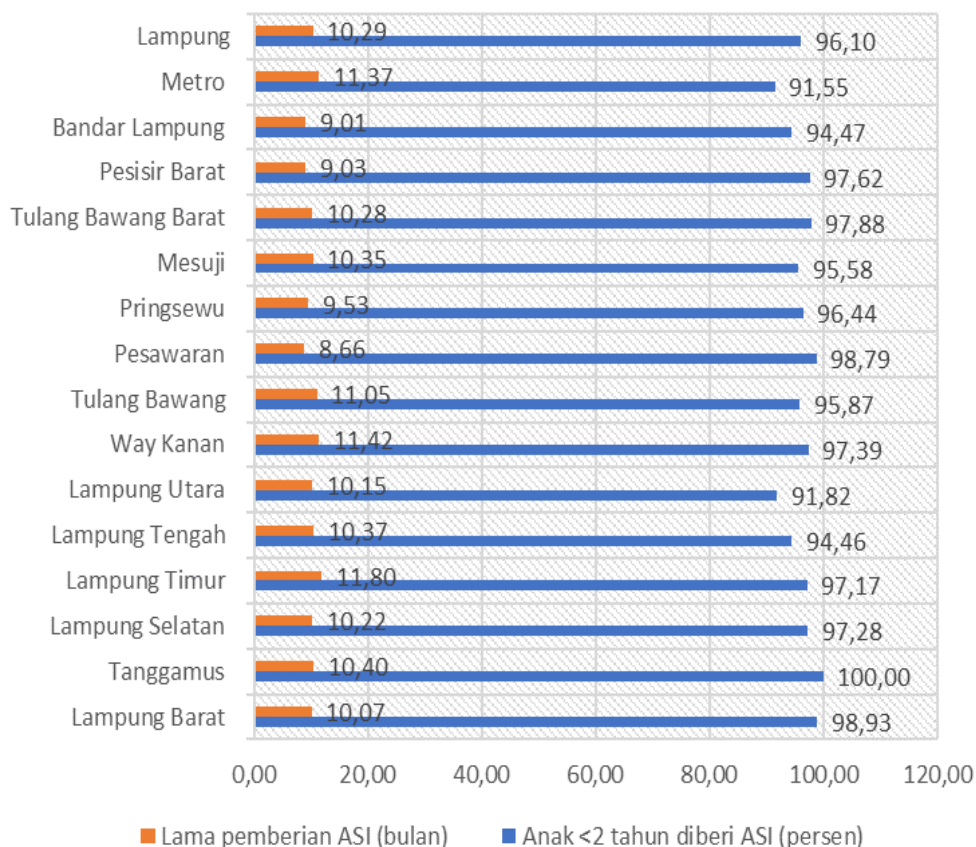
### C. Kesehatan Anak

Salah satu upaya untuk meningkatkan AHH juga dapat dilakukan sejak usia dengan dengan memberikan imunisasi lengkap kepada Balita. Pemberian imunisasi lengkap dapat membantu daya tahan tubuh anak dimasa mendatang sehingga memiliki harapan hidup yang lebih lama. Pada tahun 2016, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap di Provinsi Lampung masih rendah dengan capaian 60,36 persen. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji merupakan daerah dengan capaian persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap kurang dari 50 persen. Kemudahan aksesibilitas dan peningkatan kesadaran orang tua dalam memberikan imunisasi lengkap kepada balita menjadi upaya nyata yang perlu dilakukan agar balita memiliki harapan hidup yang lebih lama.



Gambar 2.10 Persentase bayi mendapatkan imunisasi lengkap di Lampung  
 Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

Upaya lain dalam meningkatkan AHH adalah dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada anak usia 0-2 tahun. Pada usia tersebut, ASI merupakan asupan yang paling memiliki manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan daya tahan tubuh anak. Pada tahun 2016, capaian persentase anak kurang dari 2 tahun yang pernah diberi ASI di Provinsi Lampung sebanyak 96,10 persen. Kondisi ini merata pada berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Lampung. Namun demikian, lama waktu pemberian ASI kepada anak usia kurang dari 2 tahun di Provinsi Lampung hanya 10,29 bulan dan kondisi ini juga merata terjadi diberbagai wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Upaya peningkatan lamanya pemberian ASI perlu dilakukan agar tumbuh kembang anak menjadi lebih baik dimasa mendatang.



Gambar 2.11 Persentase bayi mendapatkan dan lama pemberian ASI di Lampung  
 Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemberdayaan posyandu pada tingkat bawah dan peningkatan fasilitas kesehatan pada tingkat atas. Upaya tersebut telah berhasil menekan angka kematian bayi dan jumlah bayi lahir dengan gizi buruk. Pada tahun 2016, jumlah bayi lahir di Provinsi Lampung mencapai 155.167 dengan 3.867 bayi (2,49%) lahir dengan kondisi berat badan bayi lahir rendah, dan 99 bayi (0,06%) merupakan bayi yang lahir dengan kondisi gizi buruk. Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, dan Lampung Tengah merupakan Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki kasus bayi berat badan bayi rendah dan gizi buruk terbesar di Provinsi Lampung. Upaya edukasi terhadap ibu tentang pentingnya menjaga kondisi kehamilan dan imunisasi menjadi kunci suksesnya rendahnya bayi yang lahir dengan



berat badan rendah maupun gizi buruk. Walaupun demikian harus diakui pada beberapa didaerah di Provinsi Lampung, kepedulian terhadap kesehatan ibu pada saat kehamilan masih sering diabaikan sehingga kasus ini masih sering terjadi.

Tabel 2.5. Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR, dan Bergizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Bayi Lahir Births	BBLR/LBW		Gizi Buruk Malnutrition
		Jumlah Total	Dirujuk Treated	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kabupaten/Regency</b>				
1. Lampung Barat	5624	106	93	-
2. Tanggamus	11084	320	320	1
3. Lampung Selatan	20313	297	297	6
4. Lampung Timur	17661	477	464	18
5. Lampung Tengah	22013	397	397	12
6. Lampung Utara	11120	264	264	10
7. Way Kanan	7608	73	73	5
8. Tulang Bawang	8026	209	210	5
9. Pesawaran	7658	114	114	5
10. Pringsewu	7898	209	209	3
11. Mesuji	3739	103	118	1
12. Tulang Bawang Barat	5056	398	398	16
13. Pesisir Barat	3115	52	45	8
<b>Kota/Municipality</b>				
1. Bandar Lampung	17599	270	270	4
2. Metro	2740	239	239	5
<b>Lampung</b>	<b>155 167</b>	<b>3 867</b>	<b>3 867</b>	<b>99</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

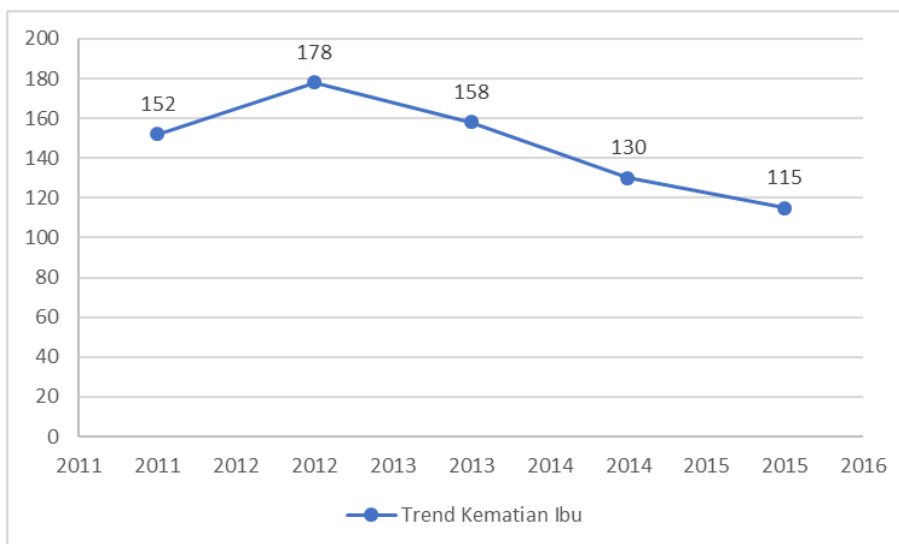
#### D. Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Balita

Peranan ibu dalam pembangunan keluarga di Indonesia memiliki posisi strategis sehingga pemerintah memberikan perhatian terhadap keberadaannya didalam keluarga. Pengurangan kematian ibu diupayakan terus meningkat setiap tahunnya oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan pembedayaan perempuan dan kelompok masyarakat. Provinsi Lampung memiliki angka kematian ibu yang cenderung



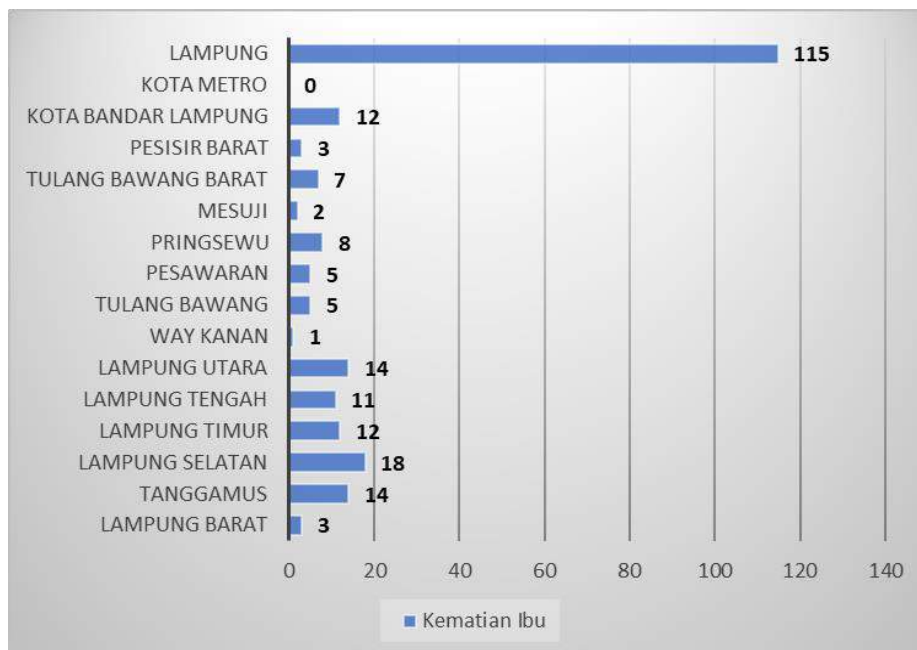


menurun sejak tahun 2012. Pada tahun 2015 angka kematian ibu di Provinsi Lampung mencapai 115 orang dan angka tertinggi dicapai pada tahun 2012 dengan capaian 178 orang. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran ibu terhadap berbagai bahaya penyakit yang dapat menjangkiti perempuan terbukti berhasil meningkatkan kesehatan ibu dan mengurangi kematian ibu.



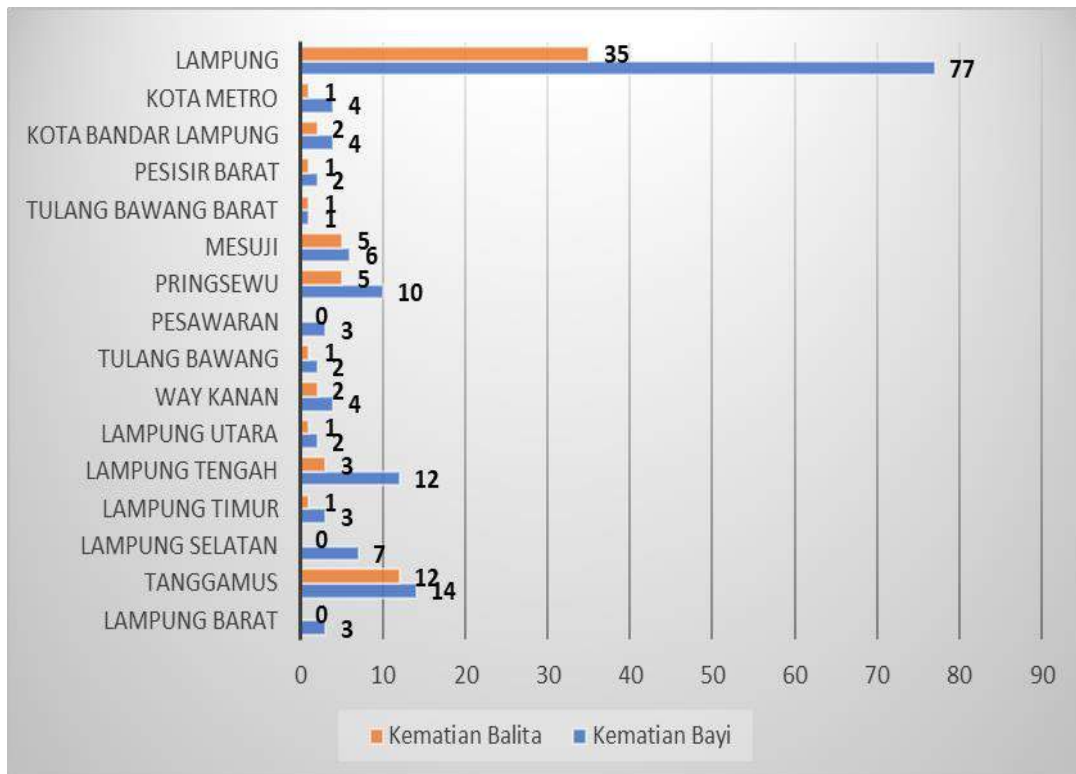
Gambar 2.6. Angka Kematian Ibu di Provinsi Lampung tahun 2011-2015  
 Sumber : Buku Data Pembangunan Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2016

Berdasarkan sebaran kematian ibu pada tahun 2015 di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung didapatkan hasil bahwa wilayah dengan angka kematian ibu tertinggi di Provinsi Lampung terdapat pada Kabupaten Lampung Selatan (18), Tanggamus (14), dan Lampung Utara (14). Beberapa wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah endemik beberapa jenis penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Upaya peningkatan kesadaran dan pemberantasan penyakit tersebut perlu diupayakan pada daerah tersebut.



Gambar 2.7. Sebaran Angka Kematian Ibu di Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2015  
 Sumber : Buku Data Pembangunan Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2016

Tingkat angka kematian bayi dan balita di Provinsi Lampung sudah cukup baik dengan capaian pada tahun 2015 mencapai 77 bayi dan 35 Balita. Wilayah sebaran kematian bayi dan balita pada tahun 2015 di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung terdapat pada Kabupaten Tanggamus sebanyak 14 bayi dan 12 balita, Lampung Tengah sebanyak 12 bayi dan 3 balita, serta Pringsewu sebanyak 10 bayi dan 5 balita. Kematian bayi ini dapat terus ditekan dengan mengintensifkan posyandu di masyarakat sebagai sarana pencegahan dan pendeteksian dini terhadap penyakit bayi dan balita. Disisi lain, peranan ibu dalam menjaga asupan gizi selama masa kehamilan dan perawatan bayi dapat menghindari berbagai resiko kematian yang menimpa ibu, bayi, dan balita.



Gambar 2.8. Sebaran Angka Kematian bayi dan balita di Kabupaten/Kota Lampung Tahun 2015  
 Sumber : Buku Data Pembangunan Gender dan Anak Provinsi Lampung Tahun 2016

**E. Penyakit Masyarakat**

Upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga diupayakan bagi masyarakat dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan gerakan kebersihan dilingkungan tempat tinggal. Namun demikian, upaya tersebut belum optimal mampu mencegah penyakit yang ada dimasyarakat. Pada tahun 2016, terdapat beberapa jenis penyakit tertentu yang memiliki porsi terbesar menjangkit masyarakat Lampung seperti demam berdarah, diare, Tuberculosis, dan Malaria. Beberapa wilayah diketahui merupakan wilayah endemik dari beberapa penyakit tersebut. Hal menarik lainnya bahwa pada tahun 2016 terdapat beberapa wilayah dimana penduduknya sudah mulai penyakit seksual menular dan HIV. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kondisi tubuh masih belum maksimal sehingga beberapa penyakit berbahaya masih dapat dijumpai oleh masyarakat Lampung.

Tabel 2.6. Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016



Kabupaten/Kota	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Lampung Barat	-	-	75	7.914	148	96
2. Tanggamus	-	-	398	15.494	310	1.164
3. Lampung Selatan	8	8	306	26.260	768	1.152
4. Lampung Timur	10	1	461	27.238	670	828
5. Lampung Tengah	20	46	351	33.456	687	60
6. Lampung Utara	-	-	554	16.364	325	36
7. Way Kanan	-	-	56	11.689	377	284
8. Tulang Bawang	16	3	331	11.597	337	85
9. Pesawaran	-	-	384	11.513	267	6.135
10. Pringsewu	-	-	1.022	10.446	192	1.284
12. Mesuji	-	-	163	5.283	90	41
13. Tulang Bawang Barat	13	-	484	7.147	144	912
14. Pesisir Barat	-	-	37	4.047	142	1.386
15. Bandar Lampung	312	1.359	1.169	26.441	1.068	15.558
16. Metro	24	-	231	4.277	87	7
<b>Lampung</b>	<b>403</b>	<b>1.417</b>	<b>6.022</b>	<b>219.166</b>	<b>5.612</b>	<b>29.028</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

### 2.3. Dimensi Perekonomian

#### A. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Wilayah dengan pengeluaran perkapita terbesar di Provinsi Lampung terjadi pada Kota Bandar Lampung (11,007juta) dan Kota Metro (11,266 juta). Adapun wilayah yang dengan pengeluaran perkapita yang rendah terjadi pada beberapa Kabupaten seperti Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Pesawaran dengan pengeluaran rata-rata sebesar 7 juta. Nilai Pengeluaran perkapita yang tidak sejalan dengan persentase



kemiskinan menunjukkan bahwa variasi konsumsi di beberapa wilayah Lampung sangat terbatas. Hal ini juga disebabkan terbatasnya akses transportasi kewilayah tersebut sehingga distribusi beberapa barang belum menjangkau wilayah tersebut.



Gambar 2.6. Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung  
 Sumber : BPS (data dinamis)

### B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Tingginya PDRB suatu wilayah belum menggambarkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini disebabkan jumlah penduduk sangat mempengaruhi dampak PDRB tersebut. PDRB perkapita merupakan alat ukur untuk menilai efektivitas PDRB. Capaian PDRB Perkapita Provinsi Lampung pada tahun 2016 mencapai 25.570.211 dengan capaian tertinggi terjadi pada Kota Bandar Lampung yang mencapai 32.933.858. Namun demikian, terdapat beberapa wilayah yang memiliki PDRB perkapita yang rendah seperti Lampung Barat, Tanggamus, Pesisir Barat,



Pringsewu, dan Way Kanan. Upaya peningkatan PDRB perkapita pada beberapa Kabupaten yang masih tertinggal dapat dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan investasi melalui penyusunan kebijakan yang mendorong tumbuhnya investasi daerah.



Gambar 2.12. Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung  
 Sumber : Statistik Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 (BPS)

### C. Inflasi

Membandingkan tingkat inflasi daerah dan nasional pada dua tahun terakhir, tampak bahwa menurunnya tingkat inflasi daerah dari 4,65 persen di tahun 2015 menjadi 2,78 persen di tahun 2016 sejalan dengan inflasi nasional yang menurun dari 3,35 persen di tahun 2015 menjadi 3,02 persen di tahun 2016. Rendahnya realisasi inflasi tersebut didukung oleh terkendalinya harga 3 (tiga) komoditas utama yakni komoditas bahan makanan bergejolak (volatile food), komoditas yang diatur harganya oleh pemerintah (administered prices) dan komoditas inti



(core). Pengendalian inflasi dilakukan diantaranya adalah melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dimana Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi ketersediaan bahan pangan dan juga perbaikan infrastruktur dalam mendukung proses distribusi barang.



Gambar 2.13. Tingkat Inflasi Lampung dan Indonesia  
 Sumber : Profil Program Pembangunan 2015-2019 Provinsi Lampung

**D. Investasi**

Indikator bidang Investasi adalah Laju pertumbuhan investasi dengan meningkatnya kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah. Sampai dengan tahun 2016, kontribusi terus meningkat yang didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai investasi PMDN di Provinsi Lampung pada tahun 2016 mencapai 6.032 milyar atau mencapai 83,72% dari total 7.205 milyar. Investasi yang meningkat ini akan membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.



Gambar 2.14. Perkembangan investasi Provinsi Lampung 2013 - 2016  
Sumber : Profil Program Pembangunan 2015-2019 Provinsi Lampung

Dari sisi perkembangan jumlah perusahaan yang menanamkan juga semakin meningkat walau didominasi oleh perusahaan asing, Pada tahun 2016, jumlah perusahaan asing mencapai 141 atau mencapai 57,79% dari total perusahaan di Lampung yang mencapai 244 perusahaan. Stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan serta didukung kemudahan akses perizinan dan sumber daya yang memadai akan meningkatkan kepercayaan perusahaan lain untuk membuka perusahaan baru di Provinsi Lampung.



Gambar 2.15. Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN Provinsi Lampung 2013 - 2016  
Sumber : Profil Program Pembangunan 2015-2019 Provinsi Lampung





**2.4. Dimensi Pendukung IPM**

**A. Kependudukan**

Salah satu masalah kependudukan klasik di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung adalah jumlah penduduk yang besar. Besarnya jumlah penduduk yang disertai kualitas sumber daya manusia dapat menjadi potensi dalam membangun bangsa. Disisi lain, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi beban dalam pembangunan seiring dengan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dijadikan justifikasi untuk menekan ketimpangan antara kuantitas dan kualitas penduduk sehingga dapat dijadikan aset pembangunan bangsa.

Tabel 2.7. Sebaran Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2014-2016

Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk Provinsi Lampung					
	2014		2015		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lampung Barat	290.388	3,62%	293.105	3,61%	295.689	3,60%
Tanggamus	567.172	7,07%	573.904	7,07%	580.383	7,07%
Lampung Selatan	961.897	11,98%	972.579	11,98%	982.885	11,98%
Lampung Timur	998.720	12,44%	1.008.797	12,43%	1.018.424	12,41%
Lampung Tengah	1.227.185	15,29%	1.239.096	15,26%	1.250.486	15,24%
Lampung Utara	602.727	7,51%	606.092	7,47%	609.304	7,43%
Way Kanan	428.097	5,33%	432.914	5,33%	437.530	5,33%
Tulang Bawang	423.710	5,28%	429.515	5,29%	435.125	5,30%
Pesawaran	421.497	5,25%	426.389	5,25%	431.198	5,26%
Pringsewu	383.101	4,77%	386.891	4,77%	390.486	4,76%
Mesuji	194.282	2,42%	195.682	2,41%	196.913	2,40%
Tulang Bawang Barat	262.316	3,27%	264.712	3,26%	266.973	3,25%
Pesisir Barat	148.412	1,85%	149.890	1,85%	151.288	1,84%
Bandar Lampung	960.695	11,97%	979.287	12,06%	997.728	12,16%
Metro	155.992	1,94%	158.415	1,95%	160.729	1,96%
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>8.026.191</b>		<b>8.117.268</b>		<b>8.205.141</b>	

Sumber : BPS Provinsi Lampung.

Pada Tabel 2.1. diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir (2014-2016) terus mengalami peningkatan. Saat ini (2016) jumlah penduduk Lampung mencapai 8.205.141 jiwa atau meningkat 178.950 jiwa (2,23%) jika dibandingkan



dua tahun lalu (2014). Besarnya jumlah penduduk Lampung terkonsentrasi pada beberapa Kabupaten/Kota sehingga dapat menimbulkan permasalahan pada pemerataan Sumber Daya Manusia. Penduduk Lampung terkonsentrasi pada 4 wilayah yang meliputi Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Kota Bandar Lampung. Namun demikian, jika dilihat dari kepadatan penduduk, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Tidak meratanya kepadatan penduduk yang tidak disertai dengan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada, akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.



Gambar 2.16. Sebaran tingkat kepadatan penduduk Provinsi Lampung Tahun 2016  
 Sumber : BPS Provinsi Lampung

Pola perkembangan jumlah penduduk, sebaran penduduk, serta kepadatan penduduk diperkirakan akan terus mengalami pola yang sama seiring dengan tidak bergesernya pola pertumbuhan penduduk di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Walaupun rata-rata



pertumbuhan penduduk di berbagai wilayah di Provinsi Lampung dalam periode tahun 2013-2016 mengalami kecenderungan penurunan setiap tahun, namun penurunan yang bersifat konstan pada seluruh wilayah di Provinsi Lampung menjadikan tingkat kepadatan penduduk dimasa mendatang tidak akan mengalami perubahan. Namun demikian, Keberhasilan pemerintah Provinsi Lampung dalam mempertahankan penurunan angka pertumbuhan penduduk menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang baik. Secara jangka panjang, keberhasilan menekan laju pertumbuhan penduduk ini setidaknya dapat mengurangi berbagai permasalahan sosial yang muncul di masa mendatang.

Tabel 2.8. Sebaran Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung Tahun 2013-2016

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
<b>Lampung Barat</b>	1,09%	0,97%	0,94%	0,88%
<b>Tanggamus</b>	1,29%	1,22%	1,19%	1,13%
<b>Lampung Selatan</b>	1,22%	1,16%	1,11%	1,06%
<b>Lampung Timur</b>	1,10%	1,06%	1,01%	0,95%
<b>Lampung Tengah</b>	1,08%	1,03%	0,97%	0,92%
<b>Lampung Utara</b>	0,68%	0,63%	0,56%	0,53%
<b>Way Kanan</b>	1,21%	1,16%	1,13%	1,07%
<b>Tulang Bawang</b>	1,48%	1,42%	1,37%	1,31%
<b>Pesawaran</b>	1,29%	1,23%	1,16%	1,13%
<b>Pringsewu</b>	1,09%	1,03%	0,99%	0,93%
<b>Mesuji</b>	0,76%	0,79%	0,72%	0,63%
<b>Tulang Bawang Barat</b>	0,99%	1,02%	0,91%	0,85%
<b>Pesisir Barat</b>	1,04%	1,01%	1,00%	0,93%
<b>Bandar Lampung</b>	2,04%	1,98%	1,94%	1,88%
<b>Metro</b>	1,59%	1,61%	1,55%	1,46%
<b>Provinsi Lampung</b>	1,24%	1,19%	1,13%	1,08%

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa daerah perkotaan memiliki tingkat pertumbuhan yang pesat jika



dibandingkan dengan wilayah lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat pada daerah perkotaan akan menimbulkan masalah tersendiri dikemudian hari mengingat wilayah daerah perkotaan memiliki wilayah yang sangat terbatas.

Komposisi penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2016 didominasi oleh laki-laki dengan rasio 1,05. Provinsi Lampung saat ini akan menghadapi bonus demografi yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun). Pada tahun 2016, jumlah usia angkatan kerja di Provinsi Lampung mencapai 5.494.572 jiwa atau mencapai 66,96% dari total penduduk Lampung. Kondisi tersebut menggambarkan kecukupan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat bekerja dalam mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi Lampung. Disisi lain, ketersediaan sumber daya manusia yang tidak didukung oleh lapangan pekerjaan yang memadai akan menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di masyarakat.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
	Laki-Laki	Perempuan		
0-4	401.490	386.765	788.255	10,10%
5-9	401.633	381.195	782.828	9,41%
10-14	373.382	353.238	725.620	9,06%
15-19	364.692	341.371	706.063	8,92%
20-24	350.392	326.906	677.298	8,61%
25-29	341.001	319.471	660.472	8,38%
30-34	333.320	320.175	653.495	8,25%
35-39	327.524	315.850	643.374	7,94%
40-44	307.016	290.821	597.837	7,02%
45-49	265.015	252.881	517.896	6,03%
50-54	223.397	215.445	438.842	5,01%
55-59	181.338	167.963	349.301	3,81%
60-64	132.847	117.147	249.994	2,65%
65+	202.647	210.219	412.866	4,82%
<b>Jumlah</b>	<b>4.205.694</b>	<b>3.999.447</b>	<b>8.205.141</b>	<b>100%</b>

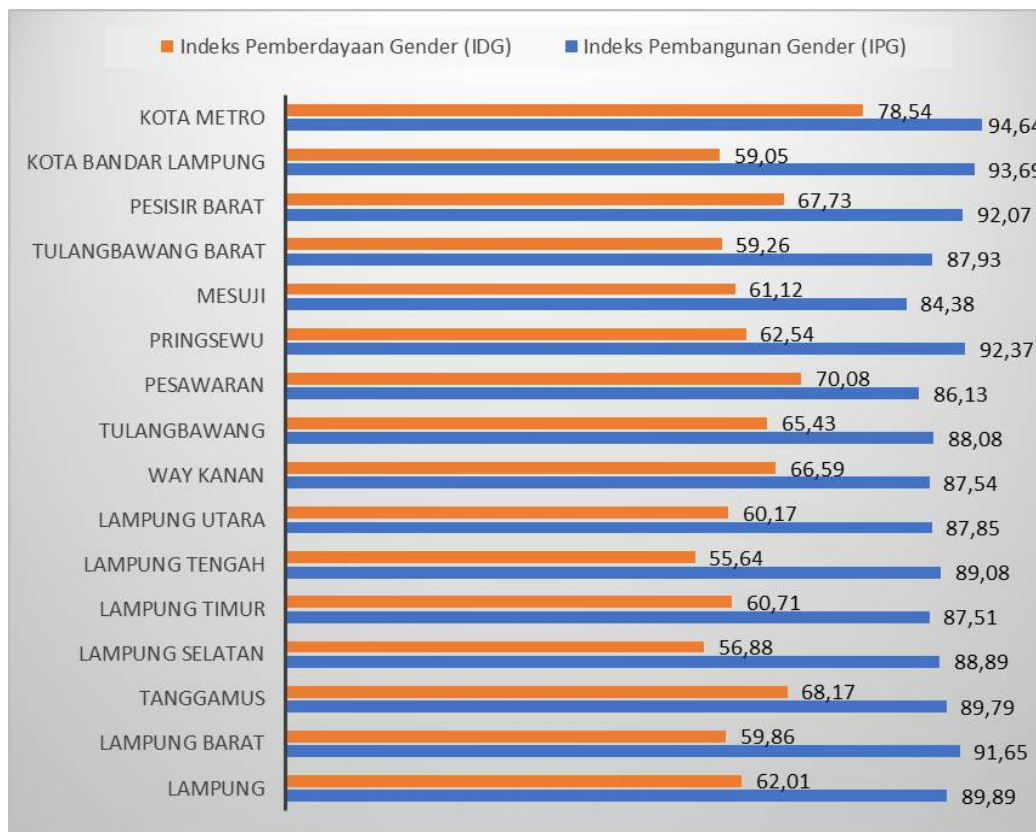


Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2017

### B. IPG dan IPG

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Ukuran pembangunan manusia berbasis gender yang dilihat dari tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. IPG Provinsi Lampung pada tahun 2015 cukup tinggi dengan capaian sebesar 89,89 dengan wilayah perkotaan masih mendominasi pencapaian nilai IPG tersebut seperti Kota Bandar Lampung (93,69) dan Kota Metro (94,64).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi & politik termasuk dalam pengambilan keputusan. IDG berfokus pada partisipasi, mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi politik dan ekonomi, serta pengambilan keputusan. Kondisi IDG di Provinsi Lampung pada tahun 2015 berada pada angka 62,01. Hal yang mengejutkan terjadi pada capaian IDG Kota Bandar Lampung yang mencapai 59,05 dan berada pada Kabupaten lain yang memiliki nilai IDG kecil. Ketersediaan dan disparitas jenis pekerjaan diduga menjadi faktor pendorong nilai IDG di Kota Bandar Lampung berada pada posisi rendah.



Gambar 2.17. Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung  
 Sumber : BPS (data dinamis)

### C. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung pada tahun 2016 berada diposisi ketiga terbesar untuk wilayah Sumatera dengan 14,29% setelah Provinsi Bengkulu (17,32%) dan Aceh (16,73%) serta masih diatas rata-rata nasional sebesar 10,86%. Adapun wilayah di Sumatera dengan persentase penduduk miskin terdapat pada Provinsi Bangka Belitung dengan capaian 5,22%. Upaya penanggulangan kemiskinan di



Provinsi Lampung telah diupayakan salah satunya melalui Gerakan Membangun Desa.

Berdasarkan hasil evaluasi Program Gerakan Membangun Desa yang berlokasi pada desa-desa tertinggal sebagai kantong kemiskinan di Provinsi Lampung sejak Tahun 2015, telah dilakukan berbagai upaya untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan puskesmas, pembangunan PAUD, perbaikan jalan desa dan jembatan, irigasi, sarana air bersih, MCK, sumur bor. Penyediaan fasilitas tersebut diharapkan akan berdampak pada pengurangan biaya produksi (transportasi), biaya kesehatan, dan biaya pendidikan keluarga miskin, sehingga pendapatan mereka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga.



Gambar 2.18. Persentase Kemiskinan se-Sumatera dan Nasional, 2016  
 Sumber : data sekunder (BPS)

Sebaran kemiskinan di Provinsi Lampung terbesar terjadi di Kabupaten Lampung Utara yang mencapai 22,92%. Hanya 5 wilayah di Provinsi Lampung yang capaiannya berada dibawah rata-rata nasional yang meliputi Kabupaten Mesuji ( 8%), Tulang Bawang Barat (8,4%), Tulang



Bawang (10,2%), Kota Metro (10,15%), dan Kota Bandar Lampung (10,15%). Kesenjangan persentase kemiskinan di Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah maupun antar penduduk yang penanganannya perlu dilakukan secara terintegrasi. Kebijakan alokasi anggaran pembangunan yang memprioritaskan pada penunjang akselerasi sektor perekonomian masyarakat merupakan hal utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki persentase penduduk miskin diatas rerata nasional.



Gambar 2.19 Distribusi Persentase Kemiskinan Provinsi Lampung, 2016  
 Sumber : data sekunder (BPS)

**D. Tenaga Kerja**

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang menggambarkan secara jelas banyaknya pengangguran yang terjadi disuatu wilayah. Banyaknya TPT akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat dan menjadi beban bagi pemerintah daerah apabila tidak dicarikan solusi. Kota Bandar Lampung merupakan wilayah dengan





TPT tertinggi yang mencapai 8,51 dan Tulang Bawang Barat merupakan wilayah dengan TPT rendah yang mencapai 2,61.



Gambar 2.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung  
Sumber : BPS (data dinamis)

Penurunan tingkat pengangguran terbuka selama periode Agustus 2011-2016 cukup signifikan. Pada Agustus 2016, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung sebesar 4,62 persen atau turun sebesar 1,16 persen dari tahun 2011 yang mencapai 5,78 persen. Kondisi ini masih dibawah rata-rata nasional sebesar 5,61 persen pada tahun 2016. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung pada masa mendatang diperkirakan akan selalu berada dibawah angka nasional mengingat laju penurunan Provinsi Lampung masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional yang selama tahun 2011-2016 hanya mencapai 0,95 persen.



Gambar 2.21. Tingkat pengangguran terbuka, 2011 - 2016  
 Sumber : Profil Program Pembangunan 2015-2019 Provinsi Lampung

Capaian tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan wilayah lain di Sumatera masih berada di urutan kelima setelah Provinsi Bangka Belitung (2,6%), Bengkulu (3,3%), Jambi (4%), dan Sumatera Selatan (4,31%). Walaupun demikian, tingkat pengangguran ini belum menggambarkan kualitas tenaga kerja dan jenis pekerjaan dimasing-masing Provinsi mengingat beberapa Provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi ternyata memiliki persentase kemiskinan yang lebih rendah.



Gambar 2.22. Perbandingan Persentase Pengangguran se-Sumatera 2016  
 Sumber : Profil Program Pembangunan 2015-2019 Provinsi Lampung



Besarnya jumlah usia kerja di Provinsi Lampung belum mampu mengangkat posisi Provinsi Lampung dalam hal jumlah pengangguran. Hal ini terjadi disebabkan tidak seluruhnya penduduk usia kerja di Provinsi Lampung merupakan penduduk yang bekerja. Beberapa diantaranya merupakan bukan angkatan kerja atau dengan kata lain penduduk yang berkategori sebagai pelajar/mahasiswa dan ibu rumah tangga. Disisi lain, kebijakan pembangunan yang belum merata di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap jumlah pengangguran yang ada di daerah-daerah termasuk Provinsi Lampung. Kondisi ini perlu diatasi oleh pemerintah pusat melalui implementasi pemerataan pembangunan seiring dengan keinginan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, pemerintah daerah juga dituntut mampu menciptakan iklim kondusif dalam upaya perluasan pembangunan.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2015 mencapai 3.832.108 orang dengan tingkat pendidikan terbesar pada tingkat pendidikan dasar yang mencapai 1.138.716 orang atau mencapai 29,72%. Adapun angkatan kerja yang berpendidikan tinggi hanya 6,48% atau 252.149 orang. Masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja menjadi persoalan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Tabel 2.10. Pendidikan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan (Jiwa) 2015

	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak atau Belum Tamat SD	Sekolah Dasar	SLTP	SMTA	Diploma I/II/III, Universitas	Jumlah
Lampung Barat	477	22.732	57.383	34.105	33.020	8.514	156.231
Tanggamus	2.637	53.390	105.508	60.551	49.446	9.251	280.783
Lampung Selatan	6.625	53.495	146.421	94.208	94.709	18.663	414.121
Lampung Timur	10.066	70.607	146.459	137.176	112.565	18.345	495.218
Lampung Tengah	6.680	107.430	175.039	144.663	166.887	31.925	632.624
Lampung Utara	4.789	34.064	104.826	55.732	66.641	13.528	279.580
Way Kanan	5.314	37.329	64.566	51.892	44.547	7.381	211.029



	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak atau Belum Tamat SD	Sekolah Dasar	SLTP	SMTA	Diploma I/II/III, Universitas	Jumlah
Tulang Bawang	2.528	25.006	58.640	43.232	52.477	7.799	189.682
Pesawaran	4.722	25.311	49.914	46.996	46.435	12.839	186.217
Pringsewu	1.086	25.576	47.363	46.258	43.107	16.233	179.623
Mesuji	2.176	15.743	35.814	21.760	9.353	3.105	87.951
Tulang Bawang Barat	2.828	22.022	45.186	31.656	21.741	6.678	130.111
Pesisir Barat	-	2.902	30.884	14.966	20.134	3.749	72.635
Bandar Lampung	2.207	26.216	62.542	93.895	182.627	77.577	445.064
Metro	860	4.392	8.171	13.219	28.035	16.562	71.239
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>52.995</b>	<b>526.215</b>	<b>1.138.716</b>	<b>890.309</b>	<b>971.724</b>	<b>252.149</b>	<b>3.832.108</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung ([www.lampung.bps.go.id](http://www.lampung.bps.go.id))

# 3

## ROADMAP IPM LAMPUNG

### 3.1. Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks. Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

Tabel 3.1. Perbandingan Perhitungan IPM Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

Sumber : data sekunder (BPS)



Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM.

**Pertama**, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

**Kedua**, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan penghitungan metode baru. Dengan melihat secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbaiki penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)

### BAB III ROADMAP IPM LAMPUNG



- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga diganti dengan harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi.

Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang



dimiliki oleh suatu wilayah. Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersediaan data. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purcashing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik. Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi *shortfall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

### **3.2. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung**

*Roadmap Grand Design* Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung ini mencakup kurun waktu 2015 sampai dengan 2025 dengan periode lima tahunan. *Roadmap* dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan *roadmap* ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-





sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

*Grand Design* Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung memiliki tahapan target yang harus dicapai pada indeks komposit pembentuk IPM yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran perkapita masyarakat. Masing-masing indeks komposit tersebut dikur melalui rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pencapaian pentahapan target tersebut akan menjamin peningkatan peringkat IPM Provinsi Lampung dimasa mendatang. Tahapan target faktor pembentuk indeks komposit IPM tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

### **3.2.1. Proyeksi Indeks Komposit IPM Provinsi Lampung**

#### **a) Dimensi Pendidikan**

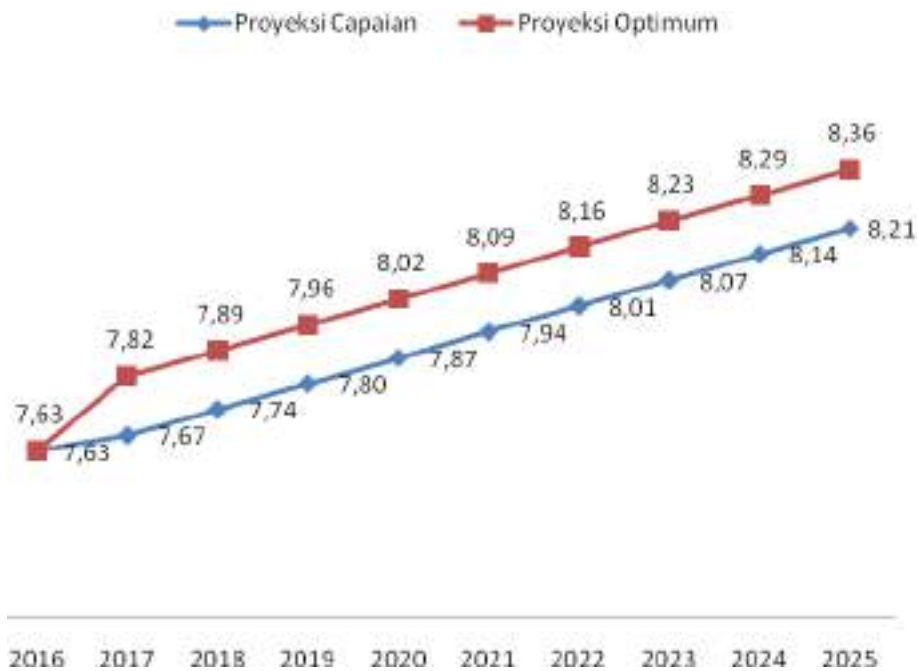
Indeks komposit IPM Provinsi Lampung pada dimensi pendidikan meliputi 2 variabel utama yaitu rata - rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Capaian kedua variabel tersebut sangat menentukan besarnya indeks pendidikan IPM Provinsi Lampung .

Target capaian rata-rata lama sekolah disusun dengan menggunakan metode proyeksi dengan persamaan linier berdasarkan capaian hasil rata-rata lama sekolah beberapa tahun sebelumnya. Target rata-rata lama bersekolah disusun setiap tahunnya untuk jangka waktu sepuluh tahun. Berdasarkan skenario angka proyeksi tersebut maka target pada tahun 2025 rata-rata lama bersekolah penduduk Provinsi Lampung 25 tahun keatas akan mencapai 8,21 tahun.

Namun demikian, proyeksi capaian rata-rata lama sekolah diperkirakan dapat lebih ditingkatkan. Proyeksi optimum merupakan kondisi yang dapat dicapai dengan asumsi terjadi akselerasi pembangunan manusia di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Proyeksi optimum disusun dengan menambahkan faktor standar deviasi +1 sebagai dasar



perhitungan proyeksi optimum. Berdasarkan skenario angka proyeksi optimum maka capaian maksimal pada tahun 2025 rata-rata lama bersekolah penduduk Provinsi Lampung 25 tahun keatas akan mencapai 8,36 tahun. Hasil kedua proyeksi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.1. Proyeksi Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung 2025  
 Sumber : Hasil perhitungan data sekunder

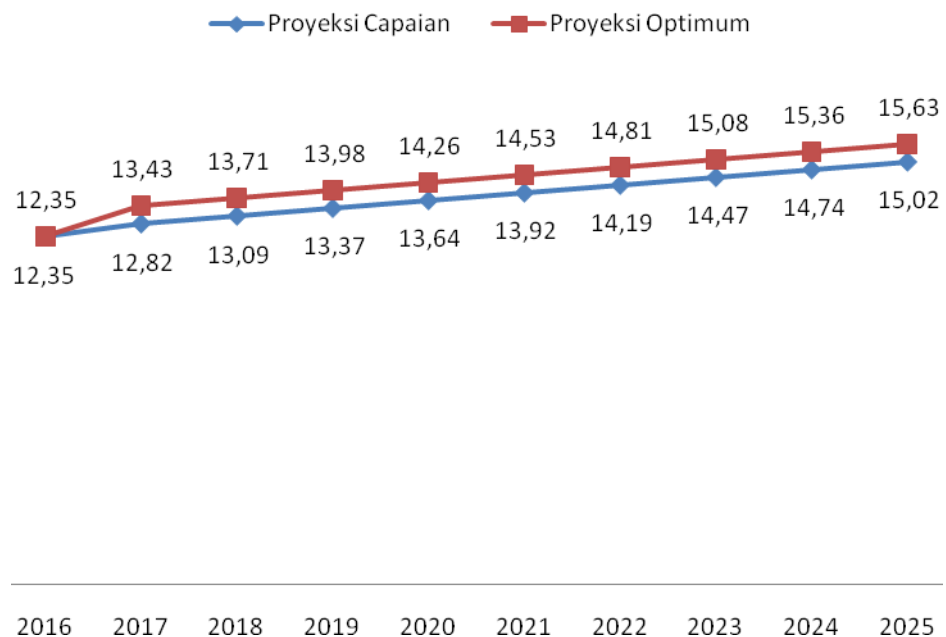
Lambatnya pertumbuhan pencapaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung disebabkan kondisi masyarakat yang berusia 25 tahun keatas yang sulit untuk menempuh pendidikan. Hal ini didorong dengan perbedaan orientasi masyarakat untuk mengutamakan bekerja dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan.

Adapun target capaian harapan lama sekolah disusun dengan menggunakan metode proyeksi dengan persamaan linier berdasarkan capaian hasil harapan lama sekolah beberapa tahun sebelumnya. Target harapan lama bersekolah disusun setiap tahunnya untuk jangka waktu sepuluh tahun. Berdasarkan skenario angka proyeksi tersebut maka



target pada tahun 2025 harapan lama bersekolah penduduk Provinsi Lampung akan mencapai 15,02 tahun.

Namun demikian, proyeksi capaian harapan lama sekolah diperkirakan dapat lebih ditingkatkan. Proyeksi optimum merupakan kondisi yang dapat dicapai dengan asumsi terjadi akselerasi pembangunan manusia di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam upayanya meningkatkan harapan lama sekolah. Proyeksi optimum disusun dengan menambahkan faktor standar deviasi +1 sebagai dasar perhitungan proyeksi optimum. Berdasarkan skenario angka proyeksi optimum maka capaian maksimal pada tahun 2025 harapan lama bersekolah penduduk Provinsi Lampung akan mencapai 15,63 tahun. Hasil kedua proyeksi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



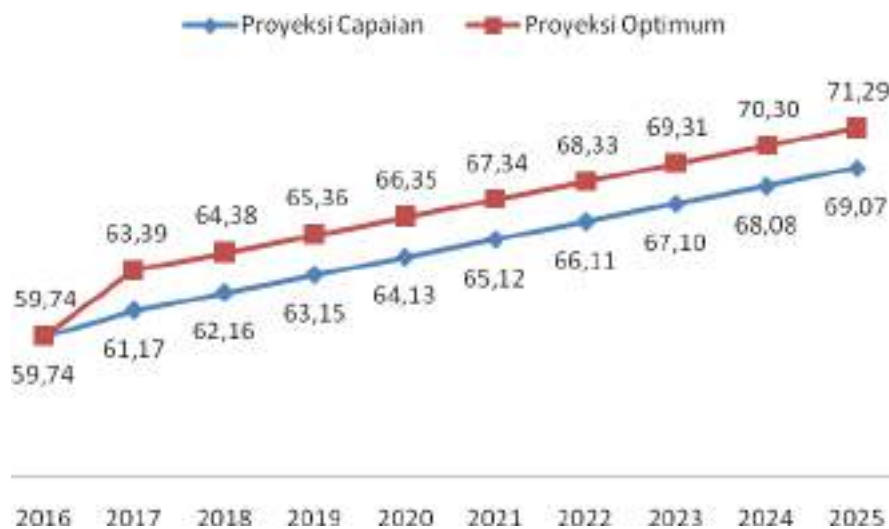
Gambar 3.2. Proyeksi Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung 2025  
 Sumber : Hasil perhitungan data sekunder

Target capaian tersebut menjadikan penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2025 rata-rata akan menempuh jenjang pendidikan menengah atas (SMA/ Sederajat). Peningkatan ini akan menjadikan kualitas Sumber



Daya Manusia Provinsi Lampung mampu memiliki daya saing dengan daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan proyeksi kedua variabel tersebut yaitu Rata - Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, maka indeks komposit pendidikan pada IPM Provinsi Lampung dapat dihitung dan diproyeksikan pada gambar dibawah ini.



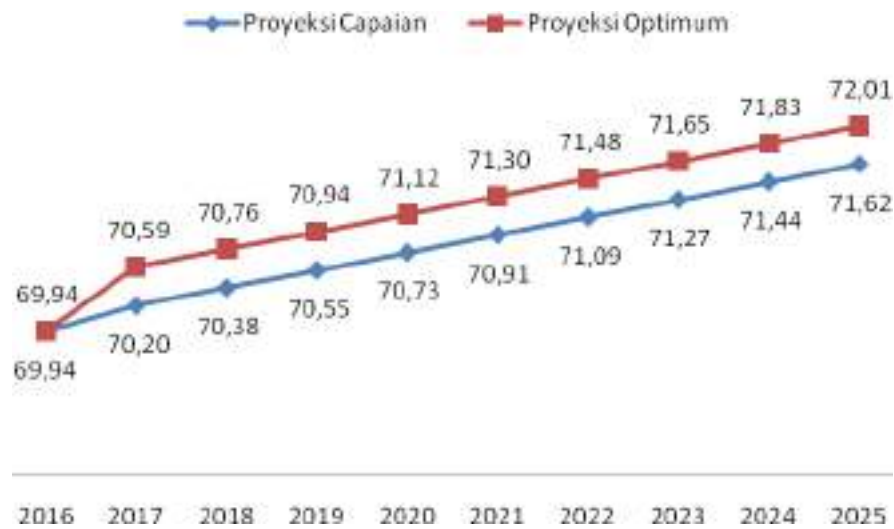
Gambar 3.3. Proyeksi Capaian indeks pendidikan Provinsi Lampung 2025  
 Sumber : Hasil perhitungan data sekunder

Capaian Indeks Pendidikan Provinsi Lampung pada tahun 2025 sebesar 69,07 atau jika mengacu kepada penggolongan IPM maka indeks pendidikan Provinsi Lampung hingga tahun 2025 masih berada pada golongan sedang. Proyeksi optimum yang dapat dicapai dari indeks pendidikan Provinsi Lampung berdasarkan hasil perhitungan faktor pembentuk indeks pendidikan pada tahun 2025 mencapai 71,29 atau berada pada kategori tinggi. Disparitas layanan pendidikan kepada masyarakat pada setiap Kabupaten/Kota menyebabkan pertumbuhan indeks pendidikan Provinsi Lampung menjadi lambat. Upaya peningkatan indeks pendidikan dapat dilakukan dengan mengurangi kesenjangan variabel pembentuk indeks pendidikan melalui intervensi kebijakan pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang mengalami ketertinggalan.

**b) Dimensi Kesehatan**

Dimensi kesehatan sebagai indeks komposit pembentuk IPM ditentukan oleh variabel Angka Harapan Hidup saat lahir. Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Target capaian harapan hidup penduduk Provinsi Lampung disusun dengan menggunakan metode proyeksi dengan persamaan linier berdasarkan capaian hasil harapan hidup penduduk Provinsi Lampung beberapa tahun sebelumnya. Target harapan hidup penduduk Provinsi Lampung disusun setiap tahunnya untuk jangka waktu sepuluh tahun. Berdasarkan skenario angka proyeksi tersebut maka target pada tahun 2025 harapan hidup penduduk Provinsi Lampung akan mencapai 71,62 tahun.

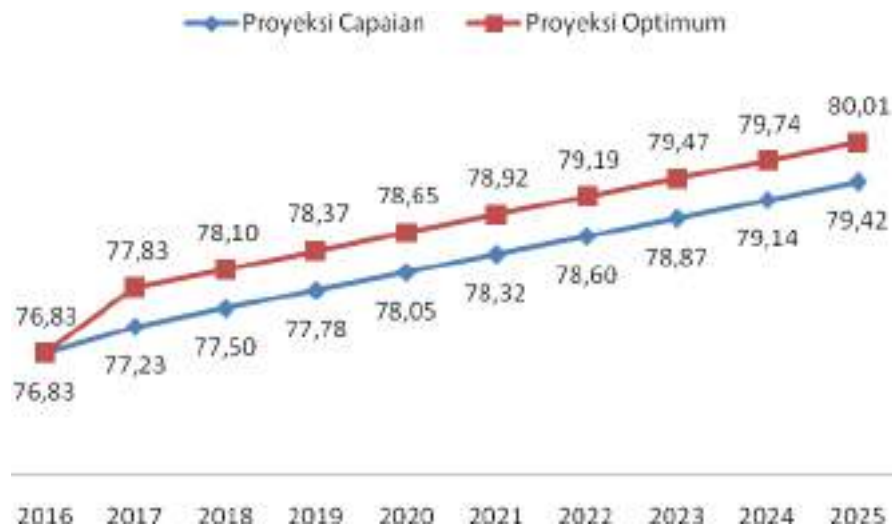
Namun demikian, proyeksi capaian angka harapan hidup diperkirakan dapat lebih ditingkatkan. Proyeksi optimum merupakan kondisi yang dapat dicapai dengan asumsi terjadi akselerasi pembangunan manusia di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam upayanya meningkatkan angka harapan hidup. Proyeksi optimum disusun dengan menambahkan faktor standar deviasi +1 sebagai dasar perhitungan proyeksi optimum. Berdasarkan skenario angka proyeksi optimum maka capaian maksimal pada tahun 2025 angka harapan hidup penduduk Provinsi Lampung akan mencapai 72,01 tahun. Hasil kedua proyeksi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.4. Proyeksi Capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung 2025  
 Sumber : hasil pengolahan data sekunder

Capaian Angka Harapan Hidup sebesar 71,62 tahun diharapkan akan tercapai pada tahun 2025 dengan capaian optimum yang dapat dicapai diperkaran sebesar 72,01 tahun atau berada pada kategori tinggi. Perkembangan Angka Harapan Hidup selanjutnya diharapkan terus meningkat. Hal ini tidak lepas dari pencapaian pertumbuhan penduduk yang mulai seimbang pada tahun 2020 sehingga mempengaruhi Angka Harapan Hidup. Pencapaian yang lebih baik dari target ini akan mampu meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung.

Berdasarkan proyeksi variabel Angka Harapan Hidup (AHH), maka indeks komposit kesehatan pada IPM Provinsi Lampung dapat dihitung dan diproyeksikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.5. Proyeksi Capaian indeks kesehatan Provinsi Lampung 2025  
 Sumber : Hasil perhitungan data sekunder

Proyeksi capaian AHH Provinsi Lampung tersebut diatas menjadikan nilai indeks kesehatan dalam penentuan IPM menjadi tinggi dengan capaian pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 79,42. Adapun capaian optimum yang dapat dicapai pada indeks kesehatan diperkirakan akan mencapai 80,01. Jika menggunakan pengkatagorian IPM, maka indeks kesehatan Provinsi Lampung berada pada tingkat tinggi bahkan mendekati sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sudah berjalan baik. Namun demikian, upaya meningkatkan indeks kesehatan melalui Angka Harapan Hidup dapat terus dilakukan dengan memberikan intervensi terhadap wilayah yang masih rendah pencapaiannya dibidang kesehatan.

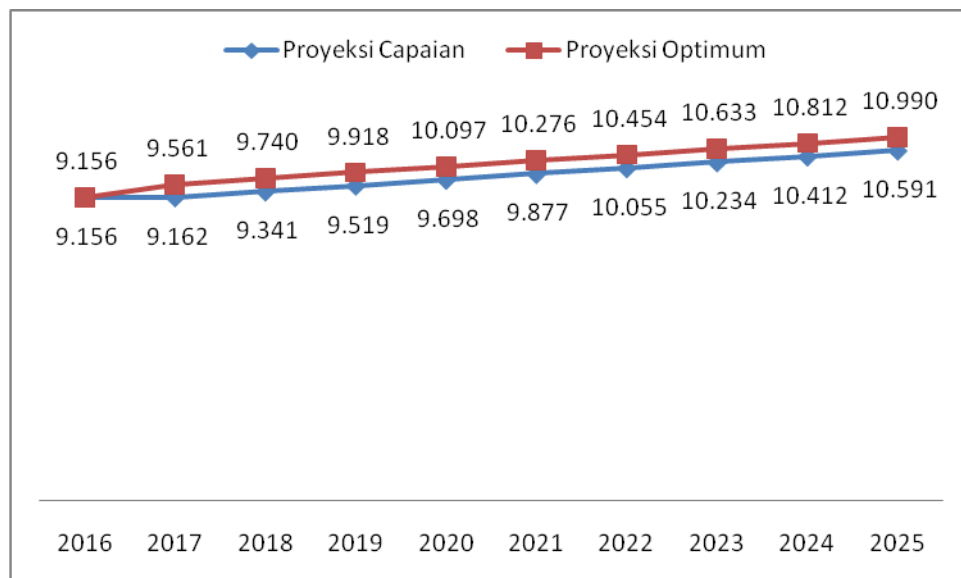
**c) Dimensi Ekonomi**

Dimensi perekonomian dalam penentuan IPM ditentukan oleh variabel Pengeluaran Perkapita Disesuaikan. Target capaian pengeluaran perkapita disesuaikan disusun dengan metoda regresi linear yang mampu menghitung, atau memprediksi, nilai masa mendatang dengan menggunakan nilai-nilai yang ada. Nilai yang diprediksikan adalah tahun untuk pengeluaran perkapita disesuaikan pada tahun 2010 – 2016. Nilai



yang diketahui tersebut, dan pengeluaran perkapita disesuaikan baru diprediksi dengan menggunakan regresi linier. Berdasarkan metoda tersebut ditargetkan pada tahun 2025 pengeluaran perkapita disesuaikan Provinsi Lampung menjadi Rp.10.591 juta.

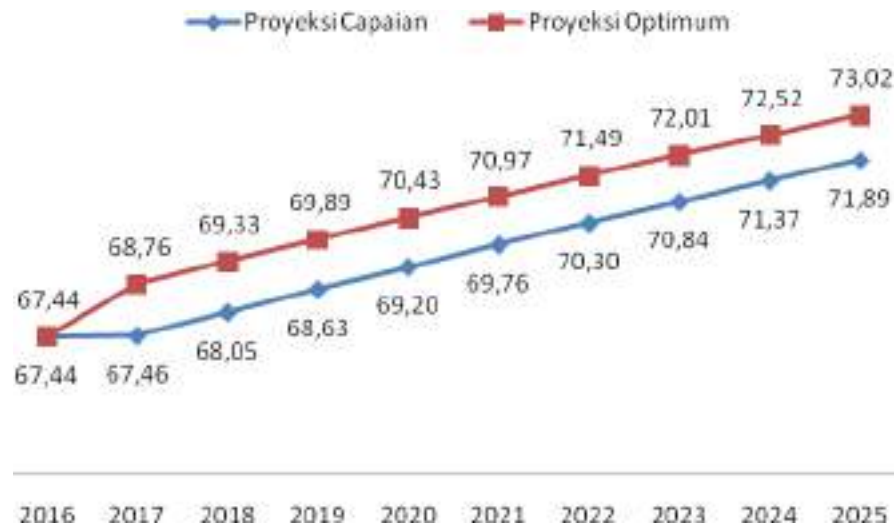
Namun demikian, proyeksi capaian pendapatan perkapita disesuaikan diperkirakan dapat lebih ditingkatkan. Proyeksi optimum merupakan kondisi yang dapat dicapai dengan asumsi terjadi akselerasi pembangunan manusia di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam upayanya meningkatkan pendapatan perkapita disesuaikan. Proyeksi optimum disusun dengan menambahkan faktor standar deviasi +1 sebagai dasar perhitungan proyeksi optimum. Berdasarkan skenario angka proyeksi optimum maka capaian maksimal pada tahun 2025 pendapatan perkapita disesuaikan penduduk Provinsi Lampung akan mencapai 10.990 juta. Hasil kedua proyeksi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.6. Proyeksi Capaian Pengeluaran Perkapita disesuaikan Provinsi Lampung 2025  
 Sumber : hasil pengolahan data sekunder

Berdasarkan proyeksi variabel pengeluaran perkapita disesuaikan, maka indeks komposit ekonomi pada IPM Provinsi Lampung dapat dihitung dan diproyeksikan pada gambar dibawah ini.





Gambar 3.7. Proyeksi Capaian indeks pengeluaran Provinsi Lampung 2025  
 Sumber : Hasil perhitungan data sekunder

Proyeksi capaian dimensi ekonomi sebagai pembentuk IPM Provinsi Lampung pada tahun 2025 sebesar 71,89 atau jika menggunakan penggolongan IPM berada pada kategori tinggi. Adapun proyeksi capaian optimum indeks ekonomi pada tahun 2025 sebesar 73,02 dan berada pada kategori tinggi. Target capaian pengeluaran perkapita tersebut akan tercapai apabila pemerintah daerah mampu menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menekan laju pertumbuhan penduduk. Pencapaian yang lebih baik dari target ini akan mampu meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung.

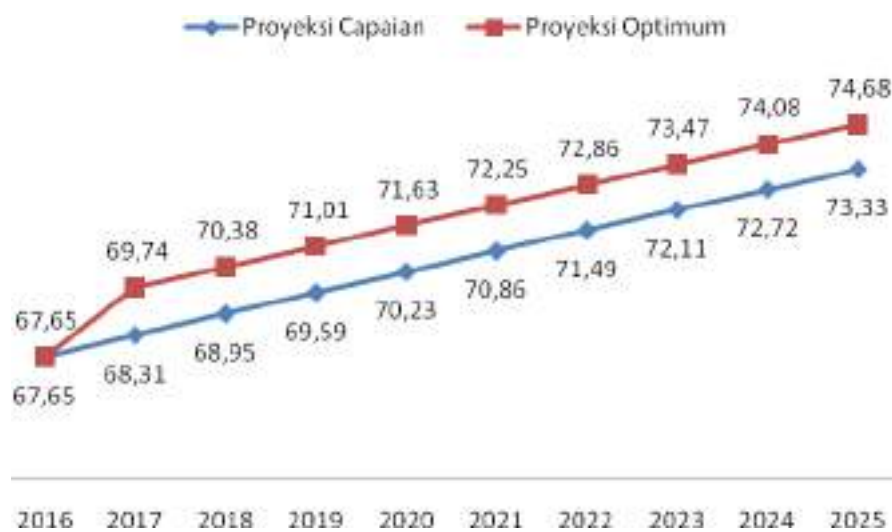
**d) Proyeksi IPM**

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Adapun rumus perhitungan IPM yaitu:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$



Target yang telah disusun pada faktor-faktor pembentuk IPM yang meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan menghasilkan IPM Provinsi Lampung pada tahun 2025 sebesar 73,33 atau berada pada kategori tinggi. Adapun capaian IPM Provinsi Lampung pada proyeksi optimum diperkirakan akan mencapai 74,68 dan masih berada pada kategori tinggi.



Gambar 3.8. Proyeksi Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung 2025  
 Sumber : pengolahan data sekunder

Target capaian IPM Provinsi Lampung tersebut tidak akan tercapai apabila pola pembangunan saat ini tidak berorientasi pada pembangunan manusia. Dengan pencapaian IPM Provinsi Lampung pada tahun 2015 sebesar 66,95 maka dibutuhkan peningkatan 8,74-10,09 agar IPM Provinsi Lampung dapat meningkat dan diharapkan berada diatas rata-rata nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya meningkatkan IPM Provinsi Lampung dimasa mendatang dengan mengoptimalkan pencapaian komponen IPM di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.



# 4

## STRATEGI PENGEMBANGAN IPM LAMPUNG

### 4.1. Tahapan Pencapaian IPM

Proyeksi Capaian IPM Provinsi Lampung yang dihitung dengan menggunakan target 5 tahunan dengan menggunakan tahun 2015 sebagai tahun dasar perhitungan pertumbuhan IPM. Pada tahun 2015, kondisi IPM Provinsi Lampung hanya daerah perkotaan seperti Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro yang memiliki indeks berkategori tinggi. Sedangkan Kabupaten yang berada pada kategori rendah terdapat di Kabupaten Mesuji dengan capaian 59,79. Adapun Kabupaten lain di Provinsi Lampung memiliki capaian IPM pada kategori sedang. Pada tahun 2015, Provinsi Lampung secara keseluruhan berada pada posisi sedang dengan capaian 66,95.



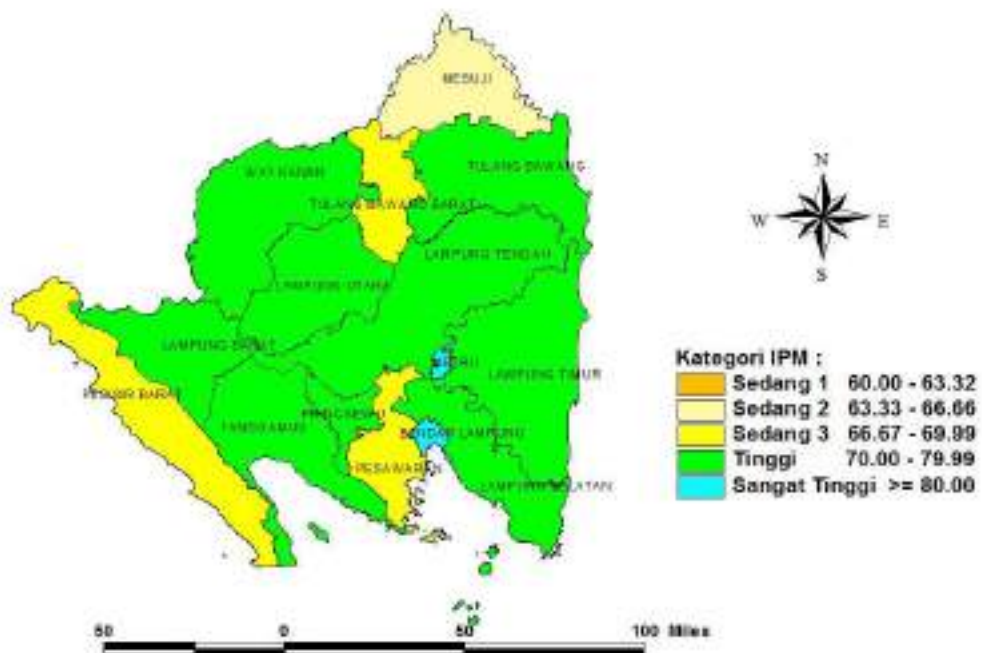
Faktor determinan dalam pembentukan nilai IPM terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkapita masyarakat yang disesuaikan. Pola pembangunan yang mengedepankan ketiga factor tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai IPM Provinsi Lampung. Dampak pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi pada factor pembentuk IPM akan mendorong perubahan nilai IPM di Provinsi Lampung. Pada tahun 2020

diharapkan beberapa Kabupaten telah berada pada posisi tinggi seperti Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Pringsewu. Disisi lain, Provinsi Lampung pada tahun 2025 tidak ada wilayah yang memiliki nilai IPM berkategori rendah, bahkan beberapa wilayah sudah akan memasuki kategori tinggi.



Peningkatan capaian nilai IPM pada berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada akhirnya mampu mendorong nilai IPM Provinsi Lampung pada kategori tinggi dengan capaian sebesar 70,23. Dengan menggunakan metode proyeksi yang sama, maka pada tahun 2025 diperkirakan capaian IPM Provinsi Lampung akan mencapai 73,33. Hal ini tidak lepas dari peningkatan capaian Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang hamper seluruhnya mencapai kategori tinggi. Adapun beberapa wilayah yang masih berkategori sedang terdiri dari Kabupaten Pesawaran, Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Bahkan wilayah perkotaan di Provinsi Lampung akan mencapai tahapan sangat tinggi dengan capaian Kota Bandar Lampung sebesar 81,48 dan Kota Metro sebesar 81,88.

## PETA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA LAMPUNG TAHUN 2025



### 2.2.1. Strategi Peningkatan IPM Pendidikan

Kebijakan dalam Pencapaian Target Indeks Pendidikan dilakukan melalui Analisis Regulasi dan Kebijakan. Dalam hal ini proyeksi IPM dan lebih khusus lagi indeks pendidikan belum tercantum dalam RPJMD Provinsi Lampung, maka dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan berikut akan direkomendasikan beberapa kebijakan pembangunan pendidikan sebagai berikut :

- Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat, dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
- Penyusunan program pendidikan secara terpadu yang juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan,
- Dalam penyelenggaraan pendidikan mengacu pada prinsip “Pendidikan murah” dan “Pendidikan Gratis” untuk masyarakat miskin.
- Pembelajaran dalam pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat.

- e. Meningkatkan atau mengintensifkan kegiatan pemberantasan buta aksara atau kesetaraan fungsional, untuk memberantas tuntas masyarakat buta huruf.
- f. Mengoptimalkan program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun.
- g. Peningkatan kemampuan, keahlian dan kualitas tenaga pengajar (guru) dalam proses belajar mengajar terutama untuk tingkat sekolah dasar, sehingga dapat mempengaruhi terhadap kualitas siswa
- h. Mewujudkan sistem pendidikan kejuruan yang memenuhi standar kebutuhan dan tuntutan pasar kerja, sehingga menunjang terhadap penurunan jumlah pengangguran.

Berdasarkan analisis permasalahan pendidikan tersebut diatas, maka pembangunan pendidikan kedepan harus diarahkan kepada :

- a. pemerataan dan perluasan akses,
- b. perlunya peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan
- c. adanya penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era glocal, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung hingga mencapai 70 atau berkategori tinggi. Untuk itu dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun dan Rintisan Wajar Dikmen 12 tahun, akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB setiap tahunnya, sehingga juga

akan mendorong perluasan pendidikan menengah. Dengan bertambahnya permintaan pendidikan menengah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung perlu melakukan perluasan pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu lain hal tidak dapat menikmati pendidikan SMA yang bersifat reguler, melalui SMA terbuka dan Paket C, sehingga pada gilirannya mendorong peningkatan APM SMA. Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung lebih mempercepat pertumbuhan SMK diiringi dengan upaya mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pasar.

Perluasan akses pendidikan tinggi diperlukan untuk menjawab meningkatnya partisipasi pendidikan menengah yang diiringi oleh kebijakan yang mengarah kepada daya saing lulusan Perguruan Tinggi secara global. Secara bersamaan, dilakukan upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu upaya untuk pemenuhan tersebut, diantaranya melalui peningkatan jumlah keahlian bidang vokasi melalui institusi politeknik. Selain itu, dikembangkan program community college yang merupakan harmonisasi antara pendidikan kejuruan di SMK, pendidikan non-formal berkelanjutan, dan vokasi.

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwaju dan eksistensi manusia dan interaksinya, sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman social dan budaya. Selain itu upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan taqwa serta berahlak mulia, etika, wawasan keangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat pro aktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang, baik di tingkat lokal, regional, maupun global.



Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standard isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran, baik pada pendidikan formal maupun pendidikan non formal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia kematangan serta tingkat perkembangan peserta didik. Dalam upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui system pengendalian secara internal, pengawasan masyarakat serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Konsep dan strategi pencapaian target IPM Provinsi Lampung bidang pendidikan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, dimana dalam penyusunan Strategi Akselerasi pencapaian Indeks Pendidikan, agar dapat diimplementasikan dalam program pembangunan pendidikan sesuai dengan RPJMD Provinsi Lampung.

### **2.2.2. Strategi Peningkatan IPM Kesehatan**

Pembangunan manusia di bidang kesehatan ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk yang cukup banyak memiliki tantangan yang besar untuk dapat menciptakan strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan harus

memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Angka Harapan Hidup saat dilahirkan (AHH)/Expectation of Life at Birth (e0), Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR), angka kematian kasar, dan status gizi merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan. Dari beberapa indikator tersebut yang disepakati untuk digunakan sebagai acuan dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah Angka Harapan Hidup saat dilahirkan (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Lampung pada tahun 2015 tercatat masih sebesar 108 bayi. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat diwujudkan dengan pelaksanaan pembangunan disegala bidang, termasuk didalamnya ada intervensi program kesehatan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Berdasarkan kriteria diatas, maka dengan tingkat kematian bayi yang terjadi pada tahun 2015, Provinsi Lampung masih termasuk kategori rendah. Ada beberapa faktor yang memiliki kekuatan dalam menurunkan angka kematian, khususnya kematian bayi dan anak, diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya kemajuan ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup;
- b. Adanya kemajuan teknologi kesehatan;
- c. Adanya kesadaran perbaikan sanitasi dan higiena; dan
- d. Adanya peningkatan persediaan makanan dan perbaikan gizi.

Resiko kematian bayi lebih besar bagi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi dibandingkan dengan ibu yang memiliki gizi cukup. Pada umumnya kekurangan gizi berkorelasi positif dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah. Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/penyakit dan berat bayi lahir rendah, juga berkaitan erat

dengan kondisi pada fase kehamilan, pertolongan kelahiran yang aman, dan perawatan bayi pada saat dilahirkan.

Upaya perbaikan derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan terus menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) harus tetap menjadi prioritas. Berbagai kasus kesehatan, terutama kasus yang mewabah harus dapat ditekan perkembangannya. Penanggulangan terhadap keluhan kesehatan yang ditunjukkan dengan adanya indikasi peningkatan pada tahun 2015 harus lebih ditingkatkan lagi. Beberapa indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah umur harapan hidup (life expectations) dan angka kematian bayi (infant mortality). Umur harapan hidup yang direpresentasikan oleh besaran angka harapan hidup saat dilahirkan (AHH) digunakan sebagai acuan dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Penduduk di Provinsi Lampung semakin memiliki umur yang panjang sebagai dampak dari pola hidup penduduk yang semakin sehat dan program kesehatan dari pemerintah yang tepat sasaran. Indikator lainnya selain angka harapan hidup yang berhubungan dengan derajat kesehatan adalah angka kematian bayi. Peningkatan derajat kesehatan dilakukan dengan menurunkan angka kematian khususnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan angka kematian balita. Kualitas kesehatan yang semakin membaik ditandai dengan angka kematian yang semakin rendah. Rendahnya angka kematian bayi akan berdampak pada meningkatnya harapan untuk hidup.

Resiko kematian bayi lebih besar bagi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi dibandingkan dengan ibu yang memiliki gizi cukup. Pada umumnya kekurangan gizi berkorelasi positif dengan keadaan social ekonomi yang rendah. Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/penyakit dan berat bayi lahir rendah, juga berkaitan erat dengan kondisi pada fase kehamilan, pertolongan kelahiran yang aman, dan

perawatan bayi pada saat dilahirkan. Dampak dari menurunnya angka kematian bayi adalah meningkatnya angka harapan hidup. Hal ini sejalan dengan kondisi indeks kesehatan masyarakat Provinsi Lampung yang pada tahun 2015 tercatat sebesar 76,77.

### **2.2.3. Strategi Peningkatan Pengeluaran Perkapita**

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga. Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian Cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga.

Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri. Ada dua cara penggunaan pendapatan. Pertama, membelanjakannya untuk barang-barang konsumsi. Kedua, tidak membelanjakannya seperti ditabung. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi. Apabila

penerimaan rumah tangga dikurangi dengan pengeluaran untuk konsumsi dan untuk transfer, maka diperoleh nilai tabungan rumah tangga. Jika perilaku konsumsi memperlihatkan dasar pendapatan yang dibelanjakan, maka tabungan adalah merupakan unsur penting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tabungan memungkinkan terciptanya modal yang dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Untuk dapat melihat apa yang dilakukan rumah tangga responden atas tabungannya dibutuhkan data tabungan seperti yang disimpan di bank atau koperasi, jumlah investasi, serta transaksi keuangan lainnya

Kenyataannya, selisih penerimaan dengan pengeluaran rumah tangga responden ada yang negatif (defisit), sehingga dalam membiayai pengeluaran dan investasinya diperlukan pinjaman (hutang), maka rumah tanggapun ada yang berhutang, dan ada yang meminjamkan uang (piutang). Jadi selain dari tabungan, sumber dana investasi dapat berasal dari pinjaman. Disamping itu, ada pula rumah tangga yang melakukan kegiatan di pasar uang atau di pasar modal sehingga terjadi transaksi finansial (keuangan) antar rumah tangga maupun dengan sektor ekonomi lain. Investasi finansial dapat berupa uang tunai, simpanan di bank, dan pemilikan surat berharga. Rumah tangga terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai karakteristik berbeda, baik dalam hal penerimaan maupun pengeluarannya.

Dalam hal pengeluaran konsumsi ada yang dilakukan secara bersama, tetapi ada pula yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga. Sedangkan dalam hal pendapatan, ada rumah tangga responden yang pendapatannya dari upah/gaji saja, dari usaha saja, atau dari gabungan keduanya. Bahkan ada yang dari selain keduanya, misalnya dari pensiun, bagi hasil, dan sebagainya. Hal ini tergantung dari keaktifan rumah tangga dalam kegiatan ekonomi. Tingkat daya beli dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. Kemampuan daya beli penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia.



## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Simpulan**

1. Pencapaian IPM Provinsi Lampung sangat besar dipengaruhi oleh pencapaian indeks pendidikan yang meliputi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas disamping pencapaian indeks kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup serta pencapaian indeks ekonomi yang diukur melalui pendapatan perkapita masyarakat yang disesuaikan.
2. Pencapaian indeks pendidikan di Provinsi Lampung masih kurang optimal. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah atas hingga tinggi yang disebabkan disorientasi tujuan masyarakat terhadap pendidikan sehingga berpengaruh pada variabel rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Lampung.
3. Pencapaian indeks kesehatan dalam pembentukan IPM sudah baik. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan teknis dalam upaya peningkatan indeks pendidikan di Provinsi Lampung terutama cakupan penduduk yang menerima jaminan kesehatan serta sanitasi penduduk yang kurang memadai.
4. Pencapaian indeks ekonomi dalam pembentukan IPM Provinsi Lampung sudah baik. Permasalahan utama dalam peningkatan indeks ekonomi adalah angka kemiskinan di Provinsi Lampung yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi capaian pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini juga mengindikasikan terjadinya disparitas distribusi pendapatan di Provinsi Lampung.
5. Capaian IPM Provinsi Lampung pada tahun 2016 yang mencapai 67,65 atau berada pada kategori sedang dan masih berada dibawah capaian nasional sebesar 70,18 atau berada pada kategori tinggi. Hal ini terjadi



disebabkan disparitas pencapaian IPM di Provinsi Lampung masih tinggi antara wilayah perkotaan dengan wilayah kabupaten terutama wilayah otonomi. Adapun proyeksi capaian IPM Provinsi Lampung pada tahun 2025 sebesar 73,33 dengan proyeksi optimum yang dapat dicapai oleh Provinsi Lampung dalam peningkatan IPM pada tahun 2025 sebesar 74,68 atau berada pada kategori tinggi.

## 5.2. Saran

1. Pengembangan pendidikan baik jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di Provinsi Lampung harus menjadi skala prioritas dalam upaya peningkatan IPM disamping meningkatkan layanan kesehatan serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Perlu dilakukan upaya peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah dengan memfasilitasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan menengah atas hingga tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pendidikan luar sekolah maupun pendanaan bagi masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
3. Perlu dilakukan upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan daerah bagi penduduk serta membangun fasilitas sanitasi yang memadai terutama di wilayah terpencil di Provinsi Lampung.
4. Upaya peningkatan perekonomian dalam rangka pengentasan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan kemampuan masyarakat untuk memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Disisi lain, program pemerintah yang mengedepankan padat karya perlu diterapkan secara optimal.
5. Peningkatan IPM dapat dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada wilayah otonom baru seperti Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal ini dilakukan guna mengejar ketertinggalan capaian IPM ketiga kabupaten tersebut.



## **BAB V PENUTUP**

6. Perlu dilakukan upaya kajian peningkatan IPM pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung untuk mengetahui lebih detail permasalahan dan solusi berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah sehingga akselerasi pencapaian IPM Provinsi Lampung dapat tercapai.